



**KOLABORASI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA TAMPORA
DESA KALIANGET KECAMATAN BANYUGLUGUR KABUPATEN
SITUBONDO**

*Collaboration of The Development Destination of Tampora Tourism at Kalianget
Village Banyuglugur District Situbondo*

SKRIPSI

Oleh
Nova Ladiana
NIM 140910201018

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**KOLABORASI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA TAMPORA
DESA KALIANGET KECAMATAN BANYUGLUGUR KABUPATEN
SITUBONDO**

*Collaboration of The Development Destination of Tampora Tourism at Kalianget
Village Banyuglugur District Situbondo*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh
Nova Ladiana
NIM 140910201018

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya bapak Sudiono dan ibu Ani Zuhra yang telah mengasuh dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, atas do'a yang selalu dipanjatkan demi kesuksesan saya, atas dukungan dan perjuangan luar biasa yang dilakukan hanya untuk kebahagiaan dan masa depan saya. Untuk itu saya mengucapkan terimakasih yang tak terbatas dan semoga atas ijinNya saya bisa membalas semuanya.
2. Kakak-kakak saya Cucuk Faizal, Lia Karyawati, Su'udah dan Noky Khairul yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta bantuan dalam penyusunan tugas akhir ini. Serta untuk keempat ponakan saya Khenzy, Fira, Alfath dan Askar yang selalu menjadi penghibur dan mengembalikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Guru-guruku yang tulus dan ikhlas mendidik, memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat luar biasa hingga jasa-jasanya tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup.
4. Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah”

(Q.S. Huud:88)

“*Nanakorobi yaoki* (Terjatuh tujuh kali, bangkit delapan kali)”

(Pepatah Jepang)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nova Ladiana

NIM : 140910201018

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Oktober 2019

Yang menyatakan,

Nova Ladiana

NIM 140910201018

SKRIPSI

KOLABORASI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA TAMPORA DESA
KALIANGET KECAMATAN BANYUGLUGUR KABUPATEN SITUBONDO

Oleh

Nova Ladiana

140910201018

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : M. Hadi Makmur, S.sos, M.AP

Dosen Pembimbing Anggota : Tree Setiawan Pamungkas S.A.P., MPA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 19 November 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP 195805101987022001

Anggota I,

Anggota II,

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP 197410072000121001

Tree Setiawan Pamungkas, S.A.P, MPA
NIP. 199010032015041001

Anggota III,

Anggota IV,

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si
NIP 195607261989021001

Dr. Sutomo, M.Si
NIP. 196503121991031003

Mengesahkan

Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo; Nova Ladiana, 140910201018, 2019: 97 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Adminitrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan bagi Pemerintah Daerah, hal ini menjadikan Pemerintah Daerah mempunyai pilihan dan wewenang dalam mengatur dan mengelola pariwisata di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang memprioritaskan sektor wisata sebagai pembangunan di daerahnya. Destinasi Wisata Tampora merupakan salah satu destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Situbondo yang terletak di kawasan hutan produksi milik Perum Perhutani KPH Probolinggo. Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tampora telah dilakukan oleh beberapa pihak di antaranya, perhutani sebagai pemilik lahan, POMI sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR), Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo serta masyarakat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pada APBD Tahun Anggaran 2017, Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo telah mengalokasikan dana sebesar 1 Miliar rupiah untuk pengembangan Destinasi Wisata Tampora. Pengembangan Destinasi Wisata Tampora meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Perhutani sebagai pemilik lahan Destinasi Wisata Tampora beserta masyarakat sekitar Tampora telah melakukan banyak hal sejak awal merintis Wisata Tampora hingga saat ini, beberapa hal yang telah dilakukan yaitu mulai membatasi hutan untuk membuat jalan setapak menuju pantai, membuat tempat bilas untuk

pengujung yang berenang, membuat kursi-kursi kayu yang ditempelkan pada pohon, serta mengelola penghasilan dari tiket masuk dan dijadikan sebagai income perhutani. Hal tersebut dilakukan seadanya, dengan biaya yang terbatas. Setelah itu, POMI sebagai CSR menyalurkan bantuan berupa dana yang kemudian dipergunakan untuk memperbaiki jalan, membuat papan-papan tulisan yang bertujuan menambah keindahan dan daya tarik wisata.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Fokus penelitian adalah pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora. Penentuan informan penelitian menggunakan purposive sampling, snowball sampling dan esidental sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi secara langsung dan analisis dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan analisis data interaksi model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora dilakukan melalui empat tahap kolaborasi yaitu *assesment*, *initiation*, *deliberation* dan *implementation*. Dalam kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora, tahap *assesment*, *initiation* dan *deliberation* telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan *colaborative governance* dan menghasilkan perjanjian kerjasama antara Perhutani dan Dinas Pariwisata yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora sepenuhnya belum sesuai dengan apa yang telah disepakati, pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing stakeholder belum dilaksanakan sepenuhnya, misalnya pada pengelolaan tiket bersama masih belum terlaksana hingga saat ini karena hasil penjualan tiket masih menjadi pendapatan perhutani. Terlepas dari hal tersebut upaya pengembangan Destinasi Wisata Tampora tetap berjalan dan menghasilkan beberapa perubahan baik.

PRAKATA

AssalamualaikumWr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tampera Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo”. Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan IImi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Kepala Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Sutomo, M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Bapak M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan masukan dan saran mengenai akademik selama saya menjadi mahasiswa baru sampai lulus serta telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Tree Setiawan Pamungkas S.A.P., MPA selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
6. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna menguji dan menyempurnakan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

8. Bapak Mulyono selaku operator Program Studi Ilmu Administrasi Negara
9. Seluruh narasumber, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo Bapak Sofwan Hadi, Kepala Bidang Pariwisata Bapak Medi, Supervisor Wisata Perhutani Bapak Jamin, Kepala Urusan Tata Usaha BKPH Taman Bapak Firdaus, Bapak Asbullah selaku staf Tata Usaha BKPH Taman, Mandor Wisata Bapak Kusno, Sekretaris Pokdarwis Bapak Kahiril dan seluruh narasumber yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan izin penelitian dan meluangkan waktu dalam hal penelitian ini serta telah memberikan data dan informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh penulis;
10. Sahabatku Bella, Puput, Indah dan Agista yang selalu menghibur dan mendengarkan keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Negara 2014, terima kasih atas kebersamaan, bantuan serta semangat selama masa kuliah;
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga segala budi baik yang telah diberikan mendapat balasan yang luar biasa berkahnya dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memberikan usaha terbaiknya secara maksimal, namun skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 17 Oktober 2019

Yang menyatakan,

Nova Ladiana
NIM 140910201018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Governance.....	14
2.2 Kolaborasi.....	17
2.2.1 Kolaborasi dan Kejasama Pengelolaan Obyek Wisata Alam Bertumpu Kebutuhan Wisatawan	22
2.3 Stakeholder.....	25
2.4 Pengembangan Destinasi Pariwisata.....	29
2.5 Kerangka Berpikir.....	34
BAB 3. METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Fokus Penelitian.....	38
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	38

3.4 Penentuan Informan.....	39
3.5 Data dan Sumber Data.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.7 Metode Analisis Data.....	44
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	47
BAB 4. PEMBAHASAN.....	49
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	49
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Situbondo.....	49
4.1.2 Gambaran Umum Desa Kalianget.....	51
4.1.3 Gambaran Umum Destinasi Wisata Tampora.....	54
4.2 Hasil Penelitian.....	54
4.3 Pelaksanaan Kolaborasi.....	73
4.4 Kendala dalam kolaborasi pengembangan wisata Tampora	92
BAB 5. PENUTUP.....	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Ranking Devisa Pariwisata Terhadap Komoditas Ekspor Lainnya.....	1
1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2015.....	3
1.3 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah).....	5
2.1 Tahapan pelaksanaan <i>collaborative governance</i> menurut Morse dan Stephens(2012:567)	19
3.1 Data informan penelitian.....	40
3.2 Hasil Data Primer Penelitian.....	41
3.3 Hasil Data Sekunder Penelitian.....	42
3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	47
4.1 Latar Belakang Kolaborasi Pengembangan Tampora.....	59
4.2 Tahapan Penilaian (<i>Assesment</i>) Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tampora dikaji Menggunakan Tahapan <i>Assesment Collaborative Governance</i>	62
4.3 Tahapan Inisiasi Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tampora dikaji dengan Menggunakan Tahapan <i>Initiation Collaborative Governance</i>	65
4.4 Hak dan kewajiban stakeholder kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora.....	69
4.5 Tahapan Deliberasi Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tampora Dikaji dengan Menggunakan Tahapan Deliberasi (<i>Deliberation</i>) <i>Collaborative Governance</i>	73
4.6 Tahapan Implementasi Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tampora Dikaji Menggunakan tahap <i>implementation collaborative governance</i> oleh Morse dan Stephans	92
4.7 Pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora.....	92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Ilustrasi Kontraksi Sistem Destinasi Wisata.....	34
3.1 Teknik Analisi Data.....	45
4.1 <i>Food Courd</i> di Destinasi Wisata Tampora.....	81
4.2 Musholla di Destinasi Wisata Tampora.....	81
4.3 Gazebo di Destinasi Wisata Tampora.....	81
4.4 <i>Play Ground</i> di Destinasi Wisata Tampora.....	82
4.5 Alur Pengelolaan Tiket Destinasi Wisata Tampora.....	86
4.6 Promosi oleh Dinas Pariwisata.....	88
4.7 Pintu Masuk Destinasi Wisata Tampora.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
6.1 Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember.....	102
6.2 Surat Rekomendasi Bakesbangpol.....	103
6.3 Surat Persetujuan Ijin Penelitian Perhutani.....	104
6.4 Pedoman Wawancara.....	105
6.5 Dokumentasi Foto Penelitian.....	107
6.6 Dokumen Perjanjian Kerjasama.....	111
6.7 Dokumen Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Kawasan Hutan.....	124
6.8 Undangan Rapat Koordinasi.....	128
6.9 Laporan Pendapatan.....	131
6.10 Data Kunjungan Wisata Kabupaten Situbondo Tahun 2017.....	132



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Saat ini pariwisata di Indonesia menjadi sektor yang mampu menghasilkan devisa yang cukup besar. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau besar dan kecil dengan luas daratannya 1.919.170 km² serta memiliki luas wilayah perairan 5,4 juta km² menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati, keindahan alam, ekosistem, ekowisata, serta berbagai atraksi wisata alam yang dapat dikembangkan untuk objek wisata alam, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber kekayaan darat maupun laut yang sangat melimpah. Sumber kekayaan yang dimiliki Indonesia harus dikelola dan dikembangkan secara optimal sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan bagi setiap daerah yang mampu mengelola sumber kekayaan tersebut. Selain itu sumber kekayaan tersebut dapat mendatangkan devisa bagi negara.

Pariwisata adalah penyumbang devisa negara terbesar kedua dibawah minyak kelapa sawit. Berikut adalah tabel perolehan devisa Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2016:

Tabel 1.1 Ranking devisa pariwisata terhadap komoditas ekspor lainnya

No	Komoditas	Devisa (Juta USD)
1	CPO (Minyak dan kelapa sawit)	15,965
2	Pariwisata	13,568
3	Migas	13,105
4	Batu Bara	12,898
5	Pakaian jadi	6,229

Sumber: www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=117&id=1198, 2018

Menurut MacIntosh (1980:8) dalam I Gede dan Ketut (2009:45) pariwisata adalah rangkaian fenomena dan hubungan muncul dari interaksi para turis atau pelancong, bisnis, pemerintah setempat, komunitas setempat dalam proses menarik dan menyambut turis-turis dan pengunjung lainnya. Pembangunan

kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam. Pengelolaan potensi pariwisata merupakan upaya memanfaatkan hingga mendayagunakan potensi pariwisata untuk kepentingan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut I Gede dan Ketut (2009:86) tujuan dari pengelolaan pariwisata adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya.

Sektor pariwisata memiliki aspek yang tidak hanya berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi pariwisata semata misalnya perhotelan, restoran, penyelenggaraan paket wisata dan sebagainya, melainkan berkaitan banyak dengan aspek ekonomi yang lainnya misalkan, transportasi, telekomunikasi, bisnis riil dan berbagai ekonomi rakyat yang lain. Disamping menjadi mesin penggerak ekonomi, pariwisata juga merupakan wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran mengingat berbagai jenis wisata dapat ditempatkan dimana saja (*footlose*). Untuk itu perlu ada formulasi bagaimana mengembangkan daerah tertentu dengan melibatkan masyarakat setempat sehingga dapat berperan aktif dan menarik manfaat dari kegiatan pengembangan kepariwisataan tersebut. Pengelolaan dan pengembangan wisata dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah maupun negara. Dengan pengelolaan pariwisata yang baik, suatu negara dapat mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara dalam jumlah besar.

Saat ini kegiatan wisata merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap individu sebagai pelepas kepenatan rutinitas kerja yang semakin meningkat, sehingga pemanfaatan sumber-sumber kekayaan darat dan laut di Indonesia ke arah pengembangan pariwisata merupakan salah satu bentuk pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang sangat menjanjikan. Salah Wahab (1996:103) berpendapat bahwa pada negara berkembang seperti Indonesia memiliki potensi pariwisata yang baik, pariwisata dapat dijadikan sebagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan likuiditas keuangan negara dalam

waktu yang lebih singkat daripada sektor produksi lain seperti pertanian dan industri. Perkembangan sektor wisata selain dapat menghasilkan devisa negara juga dapat memberikan keuntungan kepada daerah, serta masyarakat yang tinggal di daerah wisata.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan bagi Pemerintah Daerah, hal ini menjadikan Pemerintah Daerah mempunyai pilihan dan wewenang dalam mengatur dan mengelola pariwisata di daerahnya. Dengan mengacu pada pedoman dan kebijakan ditingkat yang lebih tinggi, pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan mengelola potensi di masing-masing daerah agar sesuai dengan konsep pariwisata nasional.

Kabupaten Situbondo sebagai “kabupaten pantai” terdiri dari 17 kecamatan yang 14 kecamatan diantaranya berbatasan langsung dengan pantai. Letak geografis Kabupaten Situbondo yang sebagian besar berada di sepanjang jalur pantura sangat strategis untuk dijadikan sebagai tujuan destinasi wisata. Dari data jumlah kunjungan wisatawan tahun 2013-2015 wisatawan asing maupun domestik mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah wisatawan harus sejalan dengan pengembangan objek wisata agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan sehingga wisatawan akan merasa puas.

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan wisatawan Kabupaten Situbondo tahun 2013-2015

Wisatawan	Jumlah Wisatawan/Tahun (jiwa)		
	2013	2014	2015
Asing (Mancanegara)	482	718	2.616
Domestik (Nasional)	82.205	118.300	348.892
Capaian Kinerja Kunjungan Wisatawan	82	78	95

Sumber: Pusat Data Kabupaten Situbondo <https://pusda.situbondokab.go.id/8keldata/1/381>, 2018

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memprioritaskan sektor pariwisata sebagai pembangunan di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pariwisata, saat ini giat melakukan pembangunan sarana dan prasarana wisata untuk mendukung

terwujudnya program wisata terpadu lintas sektoral. Dalam program tersebut, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas sektoral harus dilibatkan dalam pembangunan kawasan destinasi wisata sehingga Situbondo memiliki sejumlah destinasi wisata unggulan baru dimasa mendatang. Dengan program tersebut, objek wisata kabupaten Situbondo dipersiapkan memiliki daya saing yang lengkap agar menjadi tujuan wisata para pengunjung domestik, regional dan mancanegara, serta pemerintah kabupaten Situbondo menginginkan agar pariwisata dapat menjadi alternatif dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, selain membangun sarana dan prasarana di daerah objek wisata yang ada di Kabupaten Situbondo, dinas pariwisata juga telah membentuk 16 kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk mendorong berkembangnya industri pariwisata dimasing-masing wilayah. 16 kelompok sadar wisata itu terbentuk dan tersebar di desa yang memiliki potensi wisata, di antaranya Desa Wonorejo, Banyuputih, Asembagus, Bantal, Kayumas, Curah Cottok, Mimbaan, Gelung, Olean, Sumbermalang, Talempong, Kalianget, Besuki, Pasir Putih, Bungatan, dan Pokdarwis Desa Klatakan. Kelompok sadar wisata yang sudah terbentuk telah melakukan pendidikan dan pelatihan kader desa wisata, bahkan para kader desa wisata dan kepala desa juga telah melakukan studi banding.

Kabupaten Situbondo memiliki beberapa aset wisata alam yang dapat dijadikan sebagai sarana pariwisata, dan pemerintah Kabupaten Situbondo terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata agar dapat menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Situbondo dan dapat meningkatkan PAD serta perekonomian masyarakat. Berdasarkan realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Situbondo menurut jenis pendapatannya pada tahun 2016. Pendapatan Asli Daerah dari hasil pariwisata masih sangat rendah dibandingkan pendapatan lainnya.

Tabel 1.3 Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo menurut jenis pendapatan (ribu rupiah) tahun 2016

Jenis Pendapatan		Jumlah (Rp.000)
1	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	173 836 184,93
1.1	Pajak Daerah	30 080 834,21
1.2	Retribusi Daerah	13 682 597,70
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4 316450,16
1.4	Lain-lain PAD yang sah	125 756 302,85
2	<i>Dana Perimbangan</i>	1 171 851 135,39
2.1	Bagi Hasil Pajak	0,00
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	0,00
2.3	Dana Alokasi Umum	895 113 268,61
2.4	Dana Alokasi Khusus	276 737 866,78
3	<i>Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	234 895 764,65
3.1	Pendapatan Hibah	6 709 843,00
3.2	Dana Darurat	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	78 067 243,65
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	87 460 278,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	62 658 400,00
3.6	Lainnya	0,00
	<i>J u m l a h</i>	1 580 583 084,97

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (www.situbondokab.bps.go.id), 2018

Salah satu keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Situbondo dan tidak kalah cantik yaitu Destinasi Wisata Tampora. Tampora menjadi salah satu dari 5 destinasi wisata terbaru yang diprioritaskan selain puncak rengganis, kampung kerapu, kampung blekok, dan besuki heritage. Kawasan Destinasi Wisata Tampora ini terletak di desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, kurang lebih 38 km dari arah pusat kota Kabupaten, arah barat atau lebih tepatnya batas paling barat dari Kabupaten Situbondo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo atau kurang lebih 151 km jarak dari ibu kota Provinsi. Nama Tampora diambil karena kawasan ini terletak di Bukit Tampora, kawasan hutan ini adalah Kawasan hutan produksi milik Perum Perhutani KPH Probolinggo (KPH Probolinggo meliputi: Probolinggo, Lumajang

dan Sebagian Situbondo). Di Tampora Pengunjung dapat menikmati indahnya pantai juga dapat merasakan dan menikmati sejuknya suasana hutan, terlebih pada musim hujan, dimana sepanjang mata memandang hutan tampak menghijau.

Destinasi Wisata Tampora memiliki dua akses jalan yaitu jalur Timur lewat gang sebelah barat masjid dan yang kedua yaitu jalur Barat melalui perbukitan dengan pemandangan pepohonan yang berjajar rapi di sepanjang jalan. Pintu masuk kawasan Destinasi Wisata Tampora yang berada di jalur barat melewati Bukit Tampora sepanjang hutan heterogen yang terdiri dari pohon jati, mangrove dan kesambi. Pohon kesambi merupakan sarana perkembangbiakan Sitlak/Kutu lak sejenis serangga yang di kembangkan di pohon kesambi yang mana hasil perkembangbiakan Sitlak/Kutu lak digunakan sebagai bahan baku untuk Plitur, Kosmetik, Pembungkus Kapsul dan lain-lain. Pengembangan Sitlak/Kutu lak hanya ada di tiga tempat di dunia, di Tampora, Nusa Tenggara Timur dan India, hal ini tentunya tidak hanya bernilai ekonomis tetapi dari sisi pengembangan kepariwisataan termasuk daya tarik wisata karena ini menyimpan otentisitas dan keunikan. Disamping itu, sisi lain Gunung/ Bukit Tampora memiliki nilai histori dan Religius dengan adanya Petilasan (Masyarakat di sana menyebut Astah) Syech Maulana Ishak.

Hal yang juga menjadi daya tarik pada Destinasi Wisata Tampora yaitu Pantai Putih Tampora dengan keindahan pantai yang tidak diragukan lagi. Kondisi geografisnya yang stabil, menjadikan keelokan kawasan wisata dapat dinikmati dalam cuaca apa pun, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Pantai ini memiliki panorama alam yang indah. Pada saat menjelang pagi maupun sore, Pantai Tampora memberikan kelebihan lainnya, yaitu adanya sunrise atau sunset yang sangat indah dengan langit yang berwarna merah dan laut yang membiaskan warna merah dari sinar matahari sore. Hewan laut di pantai ini masih beragam seperti teripang, bintang laut, landak laut, kepiting, ikan-ikan kecil, dan berbagai jenis kerang yang melimpah.

Keunikan lain dari Destinasi Wisata Tampora ini yaitu juga menawarkan wisata religi. Tampora menjadi salah satu tempat dilaksanakannya kegiatan rutin masyarakat Situbondo yaitu kegiatan Terak Mancorong. Terak Mancorong merupakan kegiatan dzikir dan bershawat bersama yang dilakukan oleh para ulama beserta masyarakat pada setiap malam bulan purnama. Kegiatan Terak Mancorong ini juga menjadi daya tarik para wisatawan untuk mengunjungi Destinasi Wisata Tampora.

Untuk dapat menikmati wisata Pantai Tampora, pengunjung dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp 5000;00 per orang dan sudah termasuk biaya parkir untuk satu kendaraan. Menurut pengelola, pantai ini didatangi pengunjung kurang lebih 20-50 pengunjung/minggu sedangkan untuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional jumlah pengunjung bisa mencapai 100-150 pengunjung. Oleh karena itu, dengan terus melakukan pengembangan diberbagai sektor akan dapat menumbuhkan daya tarik wisatawan pada Destinasi Wisata Tampora.

Selama ini, Destinasi Wisata Tampora dikelola oleh Perum Perhutani KPH Probolinggo bersama LMDH berdasarkan kerjasama atau kesepakatan yang dibuat antara Perhutani KPH Probolinggo bersama LMDH yang tertuang dalam Keputusan No. 13/ PHBM-BINLING/ PROB/2009, di mana dalam keputusan tersebut LMDH Wira Brata diberi kewenangan untuk mengelola Hutan yang berada di daerah BKPH Taman, salah satunya ialah pengelolaan atas Destinasi Wisata Tampora. Hal ini terkait dengan pola yang di pakai oleh Perum perhutani di mana dalam pengeloaan hutan harus melibatkan masyarakat atau lebih dikenal dengan PHBM (Pengeloaan Hutan Bersama Masyarakat) sehingga di sekitar hutan yang dekat dengan penduduk dibentuklah LMDH-LMDH sesuai dengan keputusan Direktur Utama Perum Perhutani.

Destinasi wisata alam yang memanfaatkan keindahan sumber daya alam sebagai produk andalan wisata alam sangat tergantung pada pengelolaannya. Menurut Fandeli (1995:49), pengelolaan sumberdaya wisata tidak hanya memanfaatkan sumberdaya tersebut, tetapi perlu upaya keterpaduan dalam

penataan terhadap lingkungan disekitarnya, pemeliharaan keberadaan dan keindahan, pengawasan, pengendalian dan pemulihan terhadap keindahan yang dimiliki oleh sumberdaya tersebut. Sumberdaya alam yang beranekaragam dari aspek fisik dan hayati serta kekayaan budaya merupakan potensi yang dapat dikelola untuk pariwisata. Perencanaan pariwisata bukan sistem yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain.

Dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Situbondo, setiap destinasi wisata diserahkan dan menjadi tanggung jawab OPD tertentu, seperti puncak rengganis menjadi tanggung jawab Dinas PUPR, Kampung Kerapu dibawah pengawasan Dinas Perikanan, Kampung Blekok dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, Besuki Heritage, dan Pantai Tampora oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Destinasi Wisata Tampora yang berada dikawasan hutan lindung milik perhutani lebih dominan dikelola oleh pihak perhutani bersama masyarakat (LMDH) setempat. Hal tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk melakukan kolaborasi dengan pihak perhutani beserta masyarakat dalam pengembangan Destinasi Wisata Tampora.

Pemerintah Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang memprioritaskan sektor wisata sebagai pembangunan di daerahnya. Destinasi Wisata Kabupaten Situbondo dipersiapkan memiliki daya saing yang lengkap agar menjadi tujuan wisata para pengunjung domestik, regional dan mancanegara dan pariwisata juga dijadikan sebagai alternatif dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Destinasi Wisata Tampora merupakan salah satu destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Situbondo yang terletak di kawasan hutan produksi milik Perum Perhutani KPH Probolinggo. Selama ini Destinasi Wisata Tampora dikelola oleh Perum Perhutani bersama LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Sebagai BUMN, Perum Perhutani memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yaitu peningkatan pendapatan dan kelestarian alam serta kesejahteraan masyarakat. Selain memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda, keduanya memiliki kendala yaitu, perum perhutani sebagai pemilik kawasan Destinasi Wisata Tampora tidak memiliki

dana atau biaya untuk melakukan pengembangan Wisata Tampora, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki dana atau biaya untuk melakukan pembangunan sarana prasarana wisata namun tidak memiliki kawasan wisata. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dari keduanya maka Perhutani dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata melakukan kolaborasi dalam rangka pengembangan Destinasi Wisata Tampora.

Pengembangan Destinasi Wisata Tampora merupakan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo sejak tahun 2017. Pada APBD Tahun Anggaran 2017, Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo telah menganggarkan dana sebesar 1 Miliar rupiah untuk pengembangan Destinasi Wisata Tampora. Pengembangan Destinasi Wisata Tampora meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang didalamnya yaitu membangun musholla dan tempat wudhu, tandon air, pendopo, food court, toilet dan tempat bilas. Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki kepentingan dan tanggung jawab yang tidak jauh berbeda, Kabupaten Situbondo memiliki kepentingan dan tanggung jawab di bidang Administratif Pemerintahan karena Tampora berada di wilayah Desa Kalianget di mana Desa Kalianget merupakan kepanjangan dari Kabupaten Situbondo sedangkan Perum Perhutani Khususnya KPH Probolinggo merupakan penanggung jawab pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dibidang kehutanan di Tampora.

Pengembangan Destinasi Wisata Tampora telah dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya, perhutani sebagai pemilik lahan, POMI sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR), Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo serta masyarakat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Perhutani sebagai pemilik lahan Destinasi Wisata Tampora beserta masyarakat sekitar Tampora telah melakukan banyak hal sejak awal merintis Wisata Tampora hingga saat ini, beberapa hal yang telah dilakukan yaitu mulai membat hutan untuk membuat jalan setapak menuju pantai, membuat tempat bilas untuk pengunjung yang berenang, membuat kursi-kursi kayu yang ditempelkan pada pohon, serta mengelola penghasilan dari tiket

masuk dan dijadikan sebagai income perhutani. Hal tersebut dilakukan seadanya, dengan biaya yang terbatas. Setelah itu, POMI sebagai CSR menyalurkan bantuan berupa dana yang kemudian dipergunakan untuk memperbaiki jalan, membuat papan-papan tulisan yang bertujuan menambah keindahan dan daya tarik wisata.

Secara umum, kolaborasi dapat diartikan sebagai proses kerjasama antarindividu, individu dengan organisasi atau antarorganisasi dalam rangka menyelesaikan masalah bersama atau mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kolaborasi juga dapat diartikan sebagai kooperasi dalam rangka menyelesaikan konflik, dengan cara mengelola konflik yang ada dalam organisasi sampai menemukan kata sepakat. Kolaborasi merupakan strategi dalam pelaksanaan governance dalam pengambilan dan implementasi kebijakan yang mengutamakan konsensus dari multiple stakeholder yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Artinya dalam mengelola objek wisata alam, pemerintah daerah melibatkan kedua domain *good governance* yaitu sektor swasta (*market*) dan masyarakat sipil. Kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora merupakan salah satu wujud konsep *governance*, dimana terdapat dua pilar utama yaitu pemerintah dan masyarakat (*civil society*) yang berkolaborasi dalam melakukan upaya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata. Morse dan Stephens (2012:566) berpendapat bahwa kolaborasi merupakan pendukung pelaksanaan *governance* yang menekankan kealamian proses kesepakatan dari berbagai aktor sosial (*stakeholder*) yang tidak hanya dari pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat maupun lembaga non-pemerintah dalam tindakan kolektif atau kerjasama. Morse and Stephens (2012:567) juga menjelaskan terdapat sejumlah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan *colaborative governance* antara lain tahap *assesment, initiation, deliberation* dan *implementation*.

Kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora dilakukan berdasarkan pada perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada hari Kamis, 2 Agustus 2018 di Kantor Bupati Situbondo. Dalam perjanjian tersebut telah disepati beberapa hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan Destinasi Wisata Tampora selain itu pembagian tugas, hak dan kewajiban serta pembagian hasil

juga telah disepakati, hal tersebut menunjukkan bahwa tahapan *assesment*, *initiation* dan *deliberation* dalam kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan *colaborative governance*. Tahapan selanjutnya yang juga penting untuk dilakukan yaitu tahap *implementation*. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora sepenuhnya belum sesuai dengan apa yang telah disepakati, pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing *stakeholder* belum dilaksanakan sepenuhnya. Misalnya pada pengelolaan tiket bersama masih belum terlaksana hingga saat ini karena hasil penjualan tiket masih menjadi pendapatan perhutani, selain itu pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan serta kegiatan monitoring dan evaluasi belum terlaksana dengan baik. Terlepas dari hal tersebut upaya pengembangan Destinasi Wisata Tampora tetap berjalan dan menghasilkan beberapa perubahan baik.

Berawal dari latar belakang mengenai beragam potensi yang dimiliki Destinasi Wisata Tampora yang patut untuk dikembangkan, alasan diperlukannya kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora, serta menariknya kolaborasi Dinas Pariwisata dan perhutani, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2008:29), masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana. Sedangkan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi (Sugiyono). Berdasarkan pengertian mengenai masalah dan dipadukan dengan latar belakang penelitian maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2008:305). Berdasarkan definisi tujuan penelitian, peneliti dapat menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya yaitu mendeskripsikan serta menganalisis pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan Destinasi Wisata Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:21) menjelaskan bahwa manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Berdasarkan definisi manfaat penelitian diatas, manfaat penelitian ini yaitu, pertama, bagi penulis penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang pengelolaan pariwisata daerah. Kedua, bagi pemerintah manfaat yang diharapkan yaitu pemerintah dapat dijadikan sebagai informasi atau masukan yang positif dalam pengelolaan aset wisata yang terdapat di daerahnya. Ketiga, bagi dunia akademis diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengembangan organisasi dan pengelolaan aset wisata, khususnya untuk program studi Administrasi Negara.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka mempunyai arti: peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (*review of related literature*). Sesuai dengan arti tersebut, suatu tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka (laporan penelitian, dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan tidak selalu harus tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan (*collateral*).

Tinjauan pustaka berperan untuk menjelaskan posisi penelitian dalam peta penelitian (Wardiyanta, 2006:90). Pembangunan teori, konsep, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual dalam tinjauan pustaka akan membuat penelitian dapat dilakukan secara sistematis yang tergabung dari teori-teori terkait masalah yang dibahas dan terlepas dari pengulangan pembahasan dari sebuah permasalahan. Tinjauan pustaka disusun berdasarkan topik penelitian. Tinjauan pustaka memuat teori, konsep penelitian terdahulu dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tinjauan pustaka merupakan alat bagi seorang peneliti untuk menegaskan identitas dan originalitas penelitiannya dengan bertumpu pada teori-teori, konsep-konsep dan hasil penelitian terdahulu terkait topik penelitiannya serta kerangka konseptual peneliti dalam membangun konsep-konsep yang mendasari penelitiannya.

Konsep dasar adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dalam sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu (Silalahi, 2012:112). Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berpikir peneliti. Secara umum konsep dasar dapat diartikan sebagai gambaran mengenai fenomena yang terjadi yang dirumuskan dalam sejumlah karakteristik tertentu.

Penelitian ini memiliki konsep dasar yang dibangun atas beberapa teori mengenai fenomena sosial terkait bagaimana pelaksanaan program optimalisasi pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Tampora meliputi:

1. *Governance*

2. Kolaborasi
3. *Stakeholder*
4. Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.1 Governance

Meuthia Genie dan Rahman (dalam Rosidi dan Fajriani 2013:2) *governance* merupakan suatu usaha kolektif antara negara dan sektor non pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial. Sedangkan menurut Osborn dan Gaebler (dalam Rosidi Fajriani 2013:2) *governance* adalah sebuah proses pemecahan masalah bersama dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. *Governance* (pemerintahan) berbeda dengan *government* (pemerintah), secara umum dapat disimpulkan bahwa Pemerintah (*government*) adalah sebuah lembaga atau orang yang memiliki tujuan mengatur dan mengelola pemerintahan (*governance*). Contoh pemerintah yaitu, Kepala desa, bupati, dan presiden. Sedangkan tata kelola/pemerintahan (*governance*) adalah rangkaian proses, kebijakan, aturan, budaya, dan organisasi dalam mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan.

Menurut UNDP, *governance* atau tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu :

1. Negara atau Pemerintah (*state*)
2. Sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*)
3. Masyarakat (*society*)

Secara fungsional, *governance* harus dilihat apakah pemerintah telah melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bank Dunia dalam Rahardjo (2011:21) mendefinisikan bahwa “*the way state power is used in managing economic and sosial resources for development of society*” (cara kewenangan pemerintah digunakan dalam mengelola sumberdaya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat. Sedangkan UNDP dalam Rahardjo (2011:22) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a*

nation's affair at all level” (penerapan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkat). Berdasarkan kedua definisi tersebut, governance memiliki tiga penyangga, yaitu *economic, politic, dan administrative*. *Economic Governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making process*) yang memfasilitasi aktifitas ekonomi didalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. *Economic Governance* memiliki implikasi untuk mewujudkan keadilan, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik). *Political governance* adalah proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Sedangkan *Administrative Governance* adalah sistem administrasi proses kebijakan.

Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, *good governance* berorientasi pada, yaitu (1) orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, (2) pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Menurut Wibowo dkk (2002) terdapat 9 prinsip *good governance* yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

2. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)
3. Transparansi (*Transparency*)
4. Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha (*responsivitas*)
5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*)
6. Kesetaraan (*Equity*)
7. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)
8. Akuntabilitas (*Accountability*)
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Governance merupakan bentuk reformasi government atau administrasi publik tradisional yang semula hanya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang sangat hirarki, lambat, syarat akan aturan terikat, kurang efektif serta kurang tanggap menjadi pelaksana administrasi publik yang pelaksanaannya lebih bebas dari aturan terikat, lebih kreatif, lebih siap mengambil resiko dan tanggap terhadap kepentingan publik dengan melibatkan usaha kolektif dari berbagai bentuk lembaga atau stakeholder yang terdiri dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga nonpemerintah.

Dalam perspektif *good governance*, pengelolaan obyek wisata alam dilakukan dengan cara kolaborasi dan kerjasama sinergis oleh ketiga domain paradigma *good governance*, yaitu pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat. Pada setiap ranah *governance*, terdapat peran-peran yang berbeda namun mempunyai fungsi yang komplementer dengan ranah yang lainnya dalam membentuk sebuah sistem *governance* (Wibowo dkk. 2002). Adapun prinsip-prinsip juga menjadi karakteristik *good governance* yaitu : partisipasi, kepastian hukum, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, equity, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, profesionalisme (Wibowo dkk, 2002).

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumberdaya alam Daerah (Pasal 366 ayat 1). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan (Pasal 363 ayat 1). Berdasarkan Pasal 366 ayat (1) disebutkan bahwa Daerah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset untuk peningkatan nilai tambah yang memberikan pendapatan daerah. Pasal-pasal tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah memberikan kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam melakukan kolaborasi dan kerjasama pengelolaan obyek wisata alam dengan pihak masyarakat dan sektor swasta.

2.2 Kolaborasi

Morse dan Stephen (2012:566) menyatakan bahwa:

“collaborative governance is this an umbrella term that encompasses various interweaving strands of public administration scholarship including intergovernmental and interagency collaboration, regionalism, cross-sector partnerships, publik service networks (or simply network studies). Consensus building, and publik engagement”.

Berdasarkan pendapat tersebut, tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) merupakan istilah umum yang mencakup berbagai untaian jalinan keilmuan administrasi publik termasuk kolaborasi antarpemerintah, antarlembaga, kedaerahan, kerja sama lintas sektor, jaringan pelayan publik, pembangunan konsensus dan keterlibatan publik. Sedangkan Ansell dan Gash (2007:545) menjelaskan *collaborative governance* sebagai berikut:

“A governing arrangement where one or more publik agencies directly engage non-state stakeholder in a collective decision making process that is formal. Consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs are assets”

Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa kolaborasi merupakan aransemen pengaturan pemerintahan yang melibatkan lebih dari satu lembaga publik bersama stakeholder non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi konsensus dan deliberatif. Kolaborasi ini dilaksanakan

dalam rangka untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan atau mengelola aset atau program publik.

Secara umum, kolaborasi dapat diartikan sebagai proses kerjasama antarindividu, individu dengan organisasi atau antarorganisasi dalam rangka menyelesaikan masalah bersama atau mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kolaborasi juga dapat diartikan sebagai kooperasi dalam rangka menyelesaikan konflik, dengan cara mengelola konflik yang ada dalam organisasi sampai menemukan kata sepakat. Dalam praktik administrasi publik kolaborasi merupakan strategi baru dalam pelaksanaan governance untuk melaksanakan pengambilan dan implementasi kebijakan dengan mengedepankan konsensus dari multiple stakeholder yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik atau mengelola program publik.

Ansel dan Gash (2007:544) mengemukakan definisi tentang *collaborative governance* yang menekankan pada enam kriteria penting yaitu:

1. forum ini diprakarsai oleh lembaga-lembaga publik atau instansi
2. peserta dalam forum ini termasuk aktor non-pemerintah
3. peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya berkonsultasi dengan lembaga-lembaga publik
4. forum secara resmi terorganisir dan memenuhi unsur-unsur kolektif
5. forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus (bahkan jika konsensus tidak dicapai dalam prakteknya)
6. fokus kerja sama adalah kebijakan publik atau manajemen publik.

Terdapat beberapa tahapan dalam kolaborasi. Berikut adalah tahapan pelaksanaan *collaborative governance* menurut Morse dan Stephens (2012:567):

Tabel 2.1 Tahapan pelaksanaan *collaborative governance* menurut Morse dan Stephens

<i>Assesment</i>	<i>Intiation</i>	<i>Deliberation</i>	<i>Implementation</i>
<i>Is collaborating necessary?</i>	<i>How are frame the issue?</i>	<i>How to develop effective working group?</i>	<i>Who will do that?</i>
<i>Are precondition in place?</i>	<i>How to engage stakeholder?</i>	<i>What group rules?</i>	<i>How to broaden support?</i>
<i>Who are the stakeholder?</i>	<i>Who/what else is needed?</i>	<i>How to invent options and dicide ?</i>	<i>What kind of governance structure?</i>
<i>Who might fill key roles (sponsor convener and facilitator)?</i>	<i>What kind of process?</i>	<i>How to facilitate manual learning?</i>	<i>How to monitor progress?</i>

Sumber: Teaching collaborative governance: Phases, Competencies, and Case Based Learning. Journal of Public Affairs Education. 37(1):71-102.(2012)

Tahapan pertama dalam proses kolaborasi adalah penafsiran (*assesment*). Tahap ini membahas tentang kondisi awal yang mempengaruhi apakah kolaborasi diperlukan dan memungkinkan atau tidak. Tahap ini dapat diartikan sebagai tahap penilaian, penilaian dalam rangka mengidentifikasi apakah kolaborasi dibutuhkan atau tidak untuk dilaksanakan. Tahapan penilaian meliputi beberapa kegiatan yaitu:

- a. memahami faktor-faktor kontekstual misalnya sejarah, kerjasama dan insentif kelembagaan atau kendala kerjasama (Ansell dan Gash, 2008; Bryson et al., 2006 dalam Morse dan Stephens (2012:568))
- b. identifikasi stakeholder (chrisslip, 2002; Gray, 1989; Linden, 2010; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens(2012:568))
- c. kesepakatan untuk mengenali masalah atau tujuan bersama yang hendak dicapai (Bryson et al, 2006: Gray, 1989; Linden, 2010 dalam Morse dan Stephens (2012:568))

- d. komitmen untuk mengejar solusi kolaboratif (Linden, 2010 dalam Morse dan Stephens (2012:568))
- e. identifikasi peran kunci yang termasuk konvener, sponsor serta identifikasi sumber daya (Carson, 2007; Chrislip, 2002; Gray, 1989; Bryson et al, 2006 dalam Morse dan Stephens (2012:568)).

Dalam rangka mengidentifikasi tahapan penelitian apakah kolaborasi dibutuhkan dan memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak.

Tahapan selanjutnya adalah inisiasi, tahapan ini mencakup kegiatan rapat *stakeholder*, membangun kelompok kerja dan proses desain (Carlson, 2007; Chrislip, 2002; Gray, 1989; Luke, 1998 (dalam Morse dan Stephens, 2012:568)). Berbeda dengan tahapan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada kegiatan analisis kemampuan, tahapan inisiasi lebih menekankan pada soft skill penyelenggaraan kerjasama, membangun kerjasama dan membentuk tim (alexander, 2006 dalam Morse dan Stephens (2012:568))

Setelah melalui tahap inisiasi, tahap selanjutnya yaitu tahap musyawarah (*deliberation*). Tahap ini mencakup kegiatan membangun aturan dasar (Gray, 1989; Luke, 1998 (dalam Morse dan Stephens, 2012:568)). Kegiatan selanjutnya adalah mengadakan musyawarah dan dialog sebagai bagian proses belajar bersama yang bertujuan untuk menciptakan dan mengeksplorasi pilihan (Carlson, 2007; Chrislip, 2002; Gray, 2008 (dalam Morse dan Stephens, 2012:568)). Pada akhirnya tahapan musyawarah mencapai kesepakatan kolaboratif (Carison, 2007; Chrislip, 2002; Gray, 1989; Luke, 1998 (dalam Morse dan Stephens, 2012:568)).

Setelah melakukan musyawarah dan mencapai suatu kesepakatan, tahapan selanjutnya adalah implementasi dan merupakan tahapan akhir dalam membangun kolaborasi *governance* yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. merancang struktur *governance* (Ansell dan Gash, 2008; Bryson et al, 2006; Gray, 1998; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:569));

- b. Membangun dukungan konstituen (Chrislip, 2002; Gray, 1989; Linden, 2010; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:569))
- c. Memantau perjanjian, evaluasi hasil dan mengelola kerjasama (Chrislip, 2002; Gray, 1998; Linden, 2010; Luke, 1998 dalam Morse dan Stephens (2012:569)).

Tahapan implementasi inilah yang menentukan apakah kolaborasi tersebut dapat terus dilangsungkan atau justru sebaliknya katika dalam proses kerja sama terjadi suatu permasalahan. Dari pengertian mengenai tahapan-tahapan kolaborasi, dalam penelitian ini peneliti memilih untuk meneliti tahapan implementasi dalam kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Perhutani beserta masyarakat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tahap-tahap kolaborasi dalam teori *collaborative Governance* oleh Morse dan Stephens (1998).

Urgensitas dan relevansi kolaborasi dan kerjasama dalam pengelolaan obyek wisata alam, karena perencanaan, pengembangan dan pemasaran suatu destinasi memerlukan kerjasama erat dari pejabat pemerintah, perencana fisik, arsitektur, analis finansial, investor, juga bisa memerlukan bantuan dari pakar ekonomi, sosiologi, purbakala dan banyak profesional lain (Hadinoto, 1996). Definisi kerjasama menurut Patterson (dalam Warsono, 2009), sebagai “*an arrangement beteen two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem*”. Merujuk pada definisi tersebut, kerja sama menunjukkan adanya kepentingan bersama (pihak-pihak yang terikat kerjasama) untuk memberikan pelayanan kepariwisataan atau memecahkan masalah obyek wisata alam secara bersama-sama.. Obyek wisata alam yang dikelola bersama melalui kerjasama bisa taman wisata atau wisata pantai.

Kolaborasi merupakan proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas, dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan, dan keterpaduan pada semua aspek organisasi (Sarundajang, 2005

- b). Kolaborasi merupakan strategi pelaksanaan *governance* dalam pengambilan

dan implementasi kebijakan yang mengutamakan konsensus dari *multiple stakeholder* yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Artinya dalam mengelola obyek wisata alam, pemerintah daerah melibatkan kedua domain *good governance* yaitu sektor swasta (*market*) dan masyarakat sipil. Secara konseptual, desentralisasi sebagai demokratisasi yang dapat menjamin partisipasi masyarakat lokal sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang efektif (Ramses, 2002). Otonomi daerah adalah salah satu bentuk nyata dari praktek demokrasi (Rauf, 2002).

Kolaborasi dan kerjasama dalam mengelola obyek wisata alam, esensinya adalah langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan wisata alam secara kreatif dan partisipatif, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaan obyek wisata alam yang kompetitif untuk memenuhi apa yang dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan oleh wisatawan. Dalam rangka memberikan pelayanan wisata yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), maka pengelola harus mengenali karakteristik wisatawan domestik maupun manca negara.

2.2.1 Kolaborasi dan Kejasama Pengelolaan Obyek Wisata Alam Bertumpu Kebutuhan Wisatawan

Dalam perspektif otonomi daerah, pengelolaan obyek wisata alam yang kreatif dan inovatif adalah ciri pemerintah daerah yang berjiwa Wirausaha (Osborne dan Gaebler (2002), sedangkan pengelolaan obyek wisata alam bertumpu pada partisipasi dan akuntabilitas adalah ciri dari paradigma *Good Governance* (UNDP 1997). Dalam perspektif *good governance* sebagai pengelola obyek wisata alam adalah pihak-pihak yang secara terintegrasi dan sinergis dari ketiga domain utama *good governance* yaitu Pemerintah Daerah (*the state*), Sektor Swasta (*Market*) dan Masyarakat Sipil (*Civil Society*).

Konsep *governance* yang melibatkan *stakeholder-stakeholder* dari dunia usaha yang direpresentasikan oleh institusi bisnis, *civil society* yang direpresentasikan berbagai bentuk organisasi-organisasi *civil society*, dan negara

yang direpresentasikan pemerintah, menghendaki kesediaan *stakeholder* tersebut, untuk mengaplikasikan nilai-nilai *governance* dalam diri mereka, dan inilah yang dinamakan sebagai *good governance* (Wibowo dkk, 2002). Kolaborasi dan kerjasama dalam konteks *good governance* pada hakekatnya merupakan bentuk partisipasi. Karena praktik *governance* oleh pemerintah bisa diasumsikan telah dilakukan secara baik apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu melibatkan *stakeholder* dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik (Wibowo dkk. 2002).

Merujuk pada pernyataan tersebut, kolaborasi (aktivitas bersama) berkaitan dengan pembuatan keputusan bersama (*joint decision making*) atau berkait dengan pembagian kontrol atas keputusan yang dibuat dalam pengelolaan obyek wisata alam yang dikelolanya. Kolaborasi esensinya adalah wujud pelibatan aktor eksternal, misalnya dalam penyelesaian masalah, desain kebijakan, monitoring, evaluasi pengelolaan obyek wisata alam. Kerjasama dilakukan adanya kepentingan bersama yang mendorong *stakeholder* memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah obyek wisata alam secara bersama-sama. Dalam perspektif wisata alam, kerjasama antara ketiga domain *good governance* dilakukan dalam pengaturan bersama (*joint*) tentang wisata pantai misalnya. Karena itu aspek-aspek yang dikerjasamakan dituangkan dalam program-program resmi dengan manfaat yang dinikmati bersama, serta biaya dan risikonya ditanggung bersama.

Dalam perspektif wisata alam, kerjasama antara ketiga domain *good governance* dilakukan dalam pengaturan bersama (*joint*) tentang wisata pantai misalnya. Karena itu aspek-aspek yang dikerjasamakan dituangkan dalam program-program resmi dengan manfaat yang dinikmati bersama, serta biaya dan risikonya ditanggung bersama. Kaitannya dengan pengelolaan obyek wisata alam bertumpu pada wisatawan sebagaimana dikatakan oleh, Soekadji (2000), yang mengatakan bahwa untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan.

Pendapat tersebut sejalan dengan Joyosuharto (1997) yang mengatakan bahwa pembangunan kepariwisataan perlu memperhatikan tuntutan kebutuhan (*demand*) wisatawan, tetapi tidak perlu brorientasi pasar semata. Terkait kebutuhan berwisata diantaranya adalah kebutuhan aktual atau *effective demand* berupa berapa wisatawan yang berwisata ketempat tujuan wisata yang pada saat ini yang menggunakan fasilitas dan membutuhkan pelayanan ditempat tersebut (Fandeli, 1997). Jika dikaitkan kolaborasi dan kerjasama *stakeholders* dalam pengelolaan obyek wisata alam, dengan kebutuhan dan harapan wisatawan, substansinya adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalitas pengelolaan, dan menjadikan wisata alam menjadi produk andalan dan unggulan daerah.

Dalam perspektif pelayanan wisata, pendapat Soekadijo (2000), dan Joyosuharto (1997) serta pernyataan Fandeli (1997) menunjukkan bahwa pelayanan wisata alam adalah bertumpu pelanggan yaitu wisatawan. Pernyataan tersebut, mengandung arti menempatkan wisatawan sebagai yang pertama (*putting customers first*) dengan melakukan *giving customers a voice and choice* (memberikan peluang kepada pelanggan menyuarakan dan memilih kebutuhannya). Mengutamakan pelanggan dalam perspektif *Reinventing Government* adalah lebih mendahulukan kebutuhan masyarakat bukan birokrasi itu sendiri atau *meeting the needs of customer, not bureaucracy* (Osborne & Gaebler, 1995). Implikasinya adalah penyelenggara layanan wisata alam, memposisikan wisatawan sebagai *valuable customer* dengan berpengangan pada semboyan *customer is a king* yang sudah lama menjadi nilai yang sangat dipegang oleh organisasi bisnis (Purwanto, 2009). Aplikasinya *good governance* menuntut pengelola obyek wisata alam yang profesional, responsif, partisipatif, demokratis, efisien, transparan dan akuntabel lebih dari itu adalah menempatkan kepentingan wisatawan sebagai unsur paling penting.

Pada dasarnya pelanggan adalah pemilik dari pelayanan. Tanpa pelanggan tidak akan pernah ada pelayanan” (Supriyanto & Sugiyanti, 2001). Pelanggan oleh Yamit (2002) diartikan “orang yang membeli dan menggunakan produk”.

Pelayanan bertumpu pada pelanggan menyebabkan kualitas pelayanan publik dipandang, ditentukan dan berdasarkan penilaian pihak penerima/pengguna yakni wisatawan. Interaksi aktif antara pemberi (pengelola obyek wisata alam) dan penerima layanan (wisatawan) merupakan bagian penting dari proses membangun partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui kolaborasi dan kerjasama sinergis yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan wisata alam yang disediakan oleh pengelola obyek wisata alam, dan meningkatkan profesionalitas pengelola dalam mengelola obyek wisata alam sesuai kebutuhan dan harapan wisatawan, sekaligus wujud akuntabilitas publik. Dalam konteks ini, pengelola obyek wisata alam dituntut mampu memaksimalkan kepuasan *stakeholders*. Terkait dengan kepuasan, Rust dan Oliver (dalam Rudiyanto, 2013) menyatakan bahwa kepuasan mencerminkan derajat kepercayaan pelanggan, pengalaman pelanggan akan membangkitkan perasaan positif.

Kesepakatan melalui konsensus bukan sebatas pada penyusunan perencanaan strategis, tetapi juga pada pengorganissian, pelaksanaan, anggaran biaya, pengawsan hingga evaluasinya. Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, hendaklah merupakan hasil kesepakatan/konsensus dari *stakeholder-stakeholder* yang akan menerima dampak baik secara langsung atau tidak langsung dari kebijakan tersebut. Mengapa konsensus, karena *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas (Wibowo dkk. 2002).

2.3 Stakeholder

Menurut Freeman (1983:91), *stakeholder* atau pemangku kepentingan dapat didefinisikan menjadi dua definisi yaitu, definisi *stakeholder* secara luas dan definisi *stakeholder* secara sempit.

Definisi *stakeholder* secara luas, yaitu sekelompok orang atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder* dalam makna luas ini meliputi kelompok kepentingan publik,

kelompok penentang, serikat kerja, pekerja, segmen pelanggan, shareowners dan stakeholder lain dalam arti luas.

Sedangkan *stakeholder* dalam arti sempit adalah sekelompok orang atau individu dalam organisasi yang tidak mandiri untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. *Stakeholder* dalam arti sempit ini meliputi pekerja, segmen pelanggan, beberapa institusi keuangan dan mereka yang dapat masuk sebagai *stakeholder* dalam arti sempit.

Menurut Grunig dan Hunt dalam Rawlins (2006:4) terdapat empat model hubungan yang dapat mengidentifikasi kerja sama *stakeholder* yang sesuai dengan literatur kerja sama publik yaitu hubungan *enabling*, hubungan fungsional, hubungan normatif dan hubungan campuran. Berikut ini merupakan pembahasan terkait empat model hubungan kerja sama *stakeholder* menurut Grunig dan Hunts.

a. Hubungan *enabling*

Mengidentifikasi *stakeholder* sebagai sekelompok orang atau individu yang memiliki beberapa kontrol atau otoritas organisasi, seperti pemegang saham, kongres, badan legislatif dan regulator pemerintah serta dewan direksi, *Stakeholder* ini memungkinkan organisasi memiliki sumber daya dan otonomi untuk beroperasi. Ketika terjadi kemungkinan kerja sama terputus, sumber daya dapat ditarik dan otonomi organisasi dapat dibatasi.

b. Hubungan fungsional

Mengidentifikasi *stakeholder* sebagai fungsi pokok organisasi dan dibagi menjadi fungsi *input*, yaitu penyediaan tenaga kerja dan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa (seperti pekerja dan *supplier*) dan fungsi *output*, yaitu konsumsi barang dan jasa (yang meliputi konsumen, distributor, dan *retailers*)

c. Hubungan normatif

Mengidentifikasi *stakeholder* sebagai asosiasi atau kelompok yang dengan organisasi memiliki kepentingan bersama. *Stakeholder* dalam hubungan normatif berbagai nilai-nilai bersama, tujuan, masalah, dan sering mencakup pesaing yang terlibat pada industri atau asosiasi profesional.

d. Hubungan campuran

Mengidentifikasi *stakeholder* sebagai sekelompok orang atau individu yang tidak memiliki interaksi yang sering dengan organisasi, tetapi menjadi terlibat dalam aksi organisasi. *Stakeholder* yang dimaksud dalam hubungan campuran ini sering muncul dalam situasi krisis. Yang termasuk dalam hubungan ini adalah media, komunitas, aktivis, LSM dan sekelompok kepentingan spesial lainnya.

Suatu wilayah yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kepariwisataan, tidak terlepas dari peran-peran kontribusi stakeholder. Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, terdapat tiga komponen pelaku usaha dan *stakeholder* pengelolaan kepariwisataan di Indonesia yaitu:

1. Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Adapun peran dan fungsi pemerintah dalam proses pengelolaan destinasi pariwisata adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat berfungsi membuat regulasi pengelolaan kepariwisataan dalam bidang pengelolaan destinasi pariwisata berperan sebagai fasilitator dalam program promosi dan pemasaran pengelolaan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN).

b. Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah daerah provinsi mempunyai fungsi melaksanakan tugas pembantuan untuk melakukan promosi dan pemasaran kepariwisataan provinsi serta mengelola destinasi pariwisata provinsi sesuai peraturan daerah masing-masing provinsi tentang rencana pembangunan Pariwisata Provinsi sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota

Pemerintah Daerah kabupaten atau Kota mempunyai peran utama untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain (sektor pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) untuk menyusun Peraturan Pariwisata Daerah Kabupaten atau Kota tentang rancangan induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten atau

Kota dan mengimplementasikannya sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

2. Dunia Usaha

Dunia Usaha merupakan pihak swasta dalam perspektif governance, memiliki andil sebagai penanam modal ataupun pelaku usaha yang bergerak dibidang penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan wisatawan atau pasar wisata. Semua yang dilakukan oleh dunia usaha adalah dalam rangka memperoleh keuntungan atau nilai tambah atau usahanya di bidang kepariwisataan tersebut. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 terdapat dua lembaga dunia usaha (swasta) yang menjadi mitra pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Dua lembaga tersebut meliputi:

- a. Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).
- b. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang anggotanya meliputi:
 1. Pengusaha Pariwisata
 2. Asosiasi usaha pariwisata
 3. Asosiasi Profesi
 4. Asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata
 5. Masyarakat Pariwisata
3. Masyarakat (sebagai tenaga kerja, pelaku kegiatan usaha kepariwisataan dan sebagai tuan rumah)

Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha pengelolaan destinasi wisata. Masyarakat berperan sebagai pelaku usaha pariwisata, tenaga kerja maupun tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata di lingkup destinasi pariwisata setempat. Menurut Sunaryo (2013:119) masyarakat memandang kegiatan kepariwisataan sebagai peluang untuk mendapatkan nilai tambah dibidang ekonomi maupun dibidang lain seperti kebanggaan identitas, kebersihan, keindahan, dan kualitas lingkungan semakin baik. Sunaryo (2013:119) berpendapat bahwa perlu adanya hubungan sinergis dan symbolic mutualistic dari segenap stakeholder yaitu pemerintah daerah, dunia

usaha dan masyarakat untuk keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan di suatu destinasi pariwisata.

2.4 Pengembangan Destinasi Wisata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Yoeti (1996:109) menyebutkan bahwa pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan dalam sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan sepenuhnya untuk bekerja atau mencari keuntungan di tempat yang dikunjungi, melainkan untuk menikmati perjalanan tersebut guna berlibur atau berekreasi untuk menyegarkan pikiran. Sedangkan menurut Salah Wahab (1982:20), pariwisata merupakan suatu industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi.

Berwisata pada dasarnya merupakan kebutuhan hidup manusia. Clawson dan Knech (1969) menyatakan bahwa berwisata merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan baik ditinjau dari segi psikologis maupun fisik. Sedang Brockman (1959) mendefinisikan berwisata adalah bentuk penggunaan waktu senggang secara menyenangkan. Merujuk pada ketiga ahli tersebut, dapat dipahami bahwa wisatawan datang pada suatu tempat wisata sangat ditentukan motivasi dan keinginan (Fandeli, 1995). Pengambilan keputusan wisatawan berangkat untuk berwisata, menurut Fandeli (1995), berkaitan dengan lima tahapan yaitu : (1) keinginan berwisata, faktor ini berkaitan dengan alasan untuk berwisata; (2) evaluasi terhadap banyaknya informasi yang mendorong wisatawan (*potetial tourist*); (3) keputusan berwisata; (4) persiapan untuk melakukan perjalanan; (5) penilaian terhadap perjalanan berwisata.

Ada dua faktor penting yang menentukan kepergian kemacetan untuk berwisata yaitu : (1) faktor pendorong, yang mendorong seseorang berwisata adalah ingin terlepas dari kehidupan yang *routine* setiap hari, lingkungan yang tercemar, kecepatan lalu-lintas dan hiruk pikuk kesibukan dikota; (2) faktor penarik, berkaitan dengan adanya atraksi wisata di daerah atau di tempat tujuan wisata (Fandeli, 1995). Di Indonesia motivasi kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik sebagian adalah karena sumber daya alam (Nuryanti, 1995).

Wisata alam dengan istilah *ecotourism* diterjemahkan menjadi ekowisata yaitu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan. Maksudnya melalui aktivitas yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat alam dari dekat, menikmati keaslian alam dan lingkungannya sehingga membuatnya tergugah untuk mencintai alam. Semuanya ini sering disebut dengan istilah *Back To Nature* (Oka A. Yoeti, 2000). Wisatawan mengunjungi antraksi dan obyek wisata alam adalah berkaitan dengan keingintahuan, pendidikan (*education*), kesenangan (*hobby*) dan penelitian (*research*) tentang sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan sekitar.

Destinasi adalah kawasan spesifik yang dipilih seorang pengunjung, ia dapat tinggal selama waktu tertentu (Hardinoto, 1996:15). Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa destinasi pariwisata atau disebut juga daerah tujuan wisata sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Destinasi pariwisata merupakan kawasan yang dipilih wisatawan untuk melakukan aktivitas wisata dengan pertimbangan kawasan tersebut memiliki unsur-unsur kepariwisataan seperti layanan produk wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, atraksi, hiburan, masyarakat yang harus dipandang secara holistik dan saling terkait satu sama lain secara sistemik yang saling menunjang dalam pelaksanaan kepariwisataan.

Unsur-unsur keunikan yang dimiliki suatu destinasi pariwisata akan mempengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjungi sebuah destinasi pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha pengembangan destinasi pariwisata. “*Destination development is here simply understood as process aiming at improving the attractiveness and functioning of places and regions as visiting areas*” (BO Svenson, Sara Nordin dan Arved zflsgeast, 2005:32). Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan destinasi pariwisata merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik dan fungsi objek dan kawasan sebagai area kunjungan. Peningkatan daya tarik kunjungan tersebut meliputi peningkatan unsur-unsur kepariwisataan seperti layanan produk wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, atraksi, hiburan, masyarakat yang dimiliki suatu daerah tujuan wisata. Peningkatan tersebut dilakukan secara holistik dan terkait satu sama lain dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan destinasi pariwisata.

Menurut Sukahar (1995) wisata alam adalah bentuk rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan ekosistemnya, baik dalam bentuk asli maupun setelah adanya perpaduan dengan daya cipta manusia. Merujuk pada pendapat Sukahar tersebut, obyek wisata alam terdiri atas : a) Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna; b) Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan (Lakoni, 1995).

Obyek wisata alam adalah alam beserta ekosistemnya, baik asli maupun setelah adanya perpaduan dengan daya cipta manusia, yang mempunyai daya tarik untuk diperlihatkan dan dikunjungi wisatawan. Pada prinsipnya obyek wisata alam adalah obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumberdaya alam dan tata lingkungan (Fandeli, 1995). Karena itu kegiatan wisata di obyek wisata alam secara garis besar dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu : a) wisata perairan atau wisata bahari berupa kegiatan berenang, snorkling,

menyelam, berlayar, berselancar, memancing, berjemur, rekreasi pantai, fotografi bawah air, canoeing, dan lain-lain. b) wisata daratan, berupa kegiatan lintas alam, mendaki gunung, penelusurn goa, berburu, bekemah, photogrfi, jalan santi, penelitian, terbang layang, dan lain-lain (Sukahar, 1995)

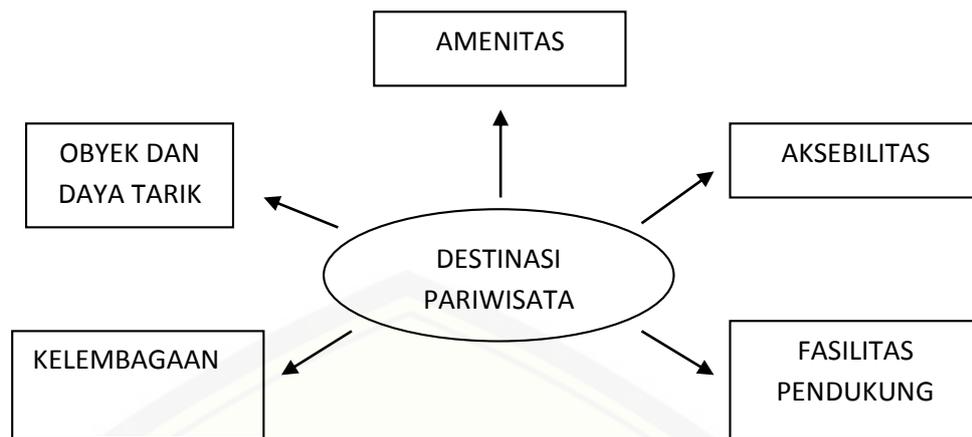
Berdasarkan jenis kawasannya, obyek wisata alam dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu obyek wisata alam yang ada dalam kawasan hutan dan obyek wisata alam yang ada diluar kawasan hutan. Menurut penggolongannya, dibedakan menjadi obyek wisata alam dalam kawasan konservasi dan obyek wisata alam yang terdapat di luar kawasan konservasi (Hardiwinoto, 1995). Obyek wisata alam dalam kawasan konservasi yaitu taman nasional, taman wisata, taman buru, taman laut dan taman hutan raya.

Hartono (1988), mengklasifikasikan potensi obyek wisata alam yang terdapat di dalam kawasan konservasi sumberdaya hutan menjadi tiga kelompok yaitu flora fauna, keunikan dan kehasan ekosistem, serta gejala atau fenomena alam. Kaitannya dengan fenomena alam, potensi obyek wisata alam berupa fenomena alam berupa kawah, sumber air panas, air terjun, danau, gua, batu-batuan berukuran besar, dan fenomena alam lainnya (Hardiwinoto, 1995). Obyek wisata alam diluar kawasan konservasi, umumnya obyek wisata alam dikelola oleh Pemerintah Daerah, Perum Perhutani (wana wisata) atau Swasta (Hardiwinoto, 1995).

Menurut Harsono (2006), potensi lokal merupakan pengetahuan atas refleksi dan kebudayaan masyarakat setempat yang terkandung dalam nilai estetika, norma aturan dan ketrampilan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Potensi lokal dapat diartikan sebagai sumberdaya alam, buatan (sosial, politik, budaya, pembangunan) dan sumberdaya manusia yang dapat digunakan untk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mensukseskan pembangunan daerah.

Menurut Cooper Dkk (dalam Sunaryo, 2013:159), kerangka pengembangan destinasi wisata harus mencakup komponen-komponen utama sebagai berikut:

- a. Objek dan Daya Tarik (*Attraction*), yang mencakup: daya tarik yang berbasis utama pada kelayakan alam, budaya, maupun buatan/artificial, seperti event atau yang sering disebut sebagai minat khusus (*special interest*).
- b. Aksesibilitas (*Accessibility*), yang mencakup dukungan sistem transportasi yang meliputi: rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan moda transportasi lain
- c. Amenitas (*Amenities*), yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi: akomodasi, rumah makan (*food and beverage*), retail, toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi wisata, dan fasilitas kenyamanan lainnya.
- d. Fasilitas pendukung (*Ancillary Service*), yaitu ketersediaan fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan, seperti bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit, dan sebagainya
- e. Kelembagaan (*Institutions*), yaitu terkait dengan keberadaan dan peran masing-masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat tuan sebagai rumah (host)

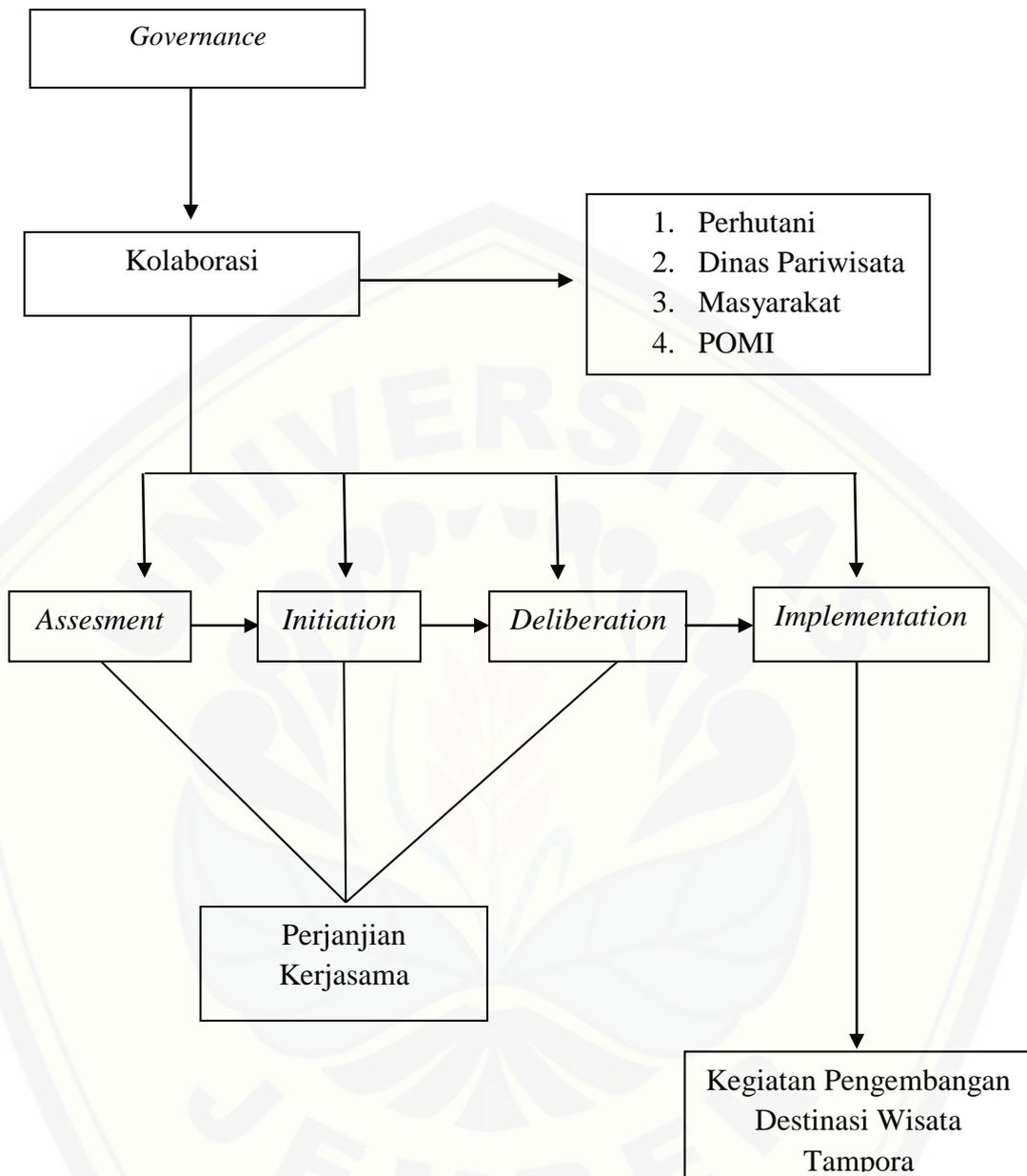


Gambar 2.1 Ilustrasi Kontruksi Sistem Destinasi Wisata

(Sumber: Cooper dkk dalam Sunaryo, 2013:160)

2.5 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kerjasama dalam pengembangan wisata Tampora. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dibangun peneliti, berikut ini merupakan kerangka berpikir yang digunakan peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan peneliti yang telah dirumuskan sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai yang pada akhirnya penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis terkait objek dan bahasan penelitian.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
2. Fokus Penelitian
3. Waktu dan Lokasi Penelitian
4. Penentuan Informan
5. Data dan Sumber Data
6. Teknik Pengumpulan Data
7. Metode Analisis Data
8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan (Universitas Jember, 2016:22). Berdasarkan teknik pengumpulan data, terdapat dua jenis penelitian yang sering digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

Menurut Sugiyono (2012:8), metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme yang digunakan untuk meneliti suatu sampel dan populasi tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis.

Sedangkan metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011:8) diartikan sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Selain itu, penelitian kualitatif menurut Sudjana (1991:7) adalah proses berpikir secara induktif yang tidak dimulai dengan teori yang bersifat umum melainkan berawal dari proses pengamatan. Ia mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2004:6).

Jenis pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tahap implementasi atau pelaksanaan kolaborasi pengembangan Objek Wisata Tampung Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian dengan jenis deskriptif berarti data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Jenis penelitian yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut adalah penelitian deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran dan uraian secara jelas tentang bagaimana tahap implementasi atau pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampung Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten

Situbondo. Dari uraian tersebut peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

3.2 Fokus Penelitian

Sugiyono (2007:209) mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Dapat dikatakan fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan batasan atau ruang lingkup penelitian, fokus penelitian juga dapat digunakan peneliti menentukan kemana arah penelitiannya.

Berdasarkan definisi fokus penelitian diatas, maka peneliti menetapkan Destinasi Wisata Tampora sebagai objek fokus penelitian. Dalam suatu penelitian, haruslah memiliki fokus penelitian yang jelas sehingga dapat memberikan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan guna menemukan dan menjawab masalah yang terjadi. Penelitian ini difokuskan ditiga tempat yaitu:

1. Dusun Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo
3. Perhutani KPH Probolinggo

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Kalianget karena merupakan lokasi Destinasi Wisata Tampora yang sedang dikembangkan, dan Dinas Pariwisata kabupaten Situbondo bersama Perhutani KPH Probolinggo merupakan kedua aktor dalam kolaborasi pengembangan Objek Wisata Tampora.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2018- Januari 2019, dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2017-2019 dimulai dari pengembangan Destinasi Wisata Tampora yang telah terbukti mendatangkan banyak wisatawan hingga sekarang.

3.4 Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, manusia merupakan instrumen utama dalam penelitian. Menurut buku pedoman penulisan karya ilmiah (2016:23), informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:211) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui
- b. orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti
- c. orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi
- d. orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya
- e. orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif maka seorang peneliti membutuhkan seorang informan yang memiliki pengetahuan tentang data atau informan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling*. Menurut Sugiyono (2011:218) menjelaskan bahwa *purpose sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Artinya, orang yang dijadikan informan dalam penelitian tersebut dianggap paling tau dan mengerti tentang apa

yang menjadi objek penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan snowball sampling yaitu informan yang direkomendasikan oleh informan utama karena dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan serta esidental sampling yaitu informan yang ditemui oleh peneliti di lokasi penelitian tanpa direncanakan untuk wawancara.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai memenuhi kriteria sebagai informan untuk mendapatkan informasi terkait tahap implementasi atau pelaksanaan kolaborasi pengembangan Objek Wisata Tampora.

Tabel 3.1 Data informan penelitian

No	Narasumber	Jabatan
1	Bapak Jamin	Supervisor wisata Perhutani KPH Probolinggo
2	Bapak Kusno	Mandor Wisata
3	Bapak Asbullah	Tata Usaha
4	Bapak Khairil Anwar	Sekretaris Pokdarwis
5	Ibu Latfiah Susanti	Sekretaris Desa Kalianget
6	Bapak Sofwan Hadi	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo
7	Bapak Medi	Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo
8	Bapak Firdaus	Kepala Urusan Tata Usaha BKPH Taman
9	Bapak Azis	Pedagang
10	Lailatul Rohaniyah	Pengunjung
11	Ika Rahmawati	Pengunjung
12	Yulia Astutik	Pengunjung
13	Puji Lestari	Pengunjung

(Sumber: diolah peneliti, 2019)

3.5 Data dan Sumber Data

Idrus (2009:61) mendefinisikan data sebagai segala keterangan atau informasi mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya Idrus juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, “data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informan, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya”. Sedangkan sumber data adalah asal peneliti memperoleh data. Sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut

1. Data Primer

Data primer yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini dari hasil wawancara mendalam terhadap beberapa sumber dan observasi di lapangan. Berikut disajikan rincian data primer yang peneliti dapatkan selama penelitian. Berikut disajikan rincian data primer yang peneliti dapatkan selama penelitian.

Tabel 3.2 Hasil data primer penelitian

No	Sumber Data	Data Primer yang diperoleh
1	Bapak Jamin	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambaran umum Objek Wisata Tampora b. Kondisi awal Objek Wisata Tampora c. Proses Kolaborasi pengembangan Objek Wisata Tampora d. Informasi Stakeholder e. Kegiatan rapat koordinasi f. Peran Perhutani g. Informasi CSR h. Pelaksanaan kolaborasi
2	Bapak Kusno	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi awal tampora b. Peran Perhutani c. Proses kolaborasi pengembangan Objek Wisata Tampora
3	Pak Asbullah	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambaran umum Objek Wisata Tampora b. Kondisi pengunjung
4	Pak Khairil Anwar	<ul style="list-style-type: none"> a. Peran Pokdarwis dalam pengembangan Objek Wisata Tampora
5	Ibu Latfiah Susanti	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambaran umum Desa Kalianget
6	Bapak Sofwan Hadi	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambaran umum Pariwisata Kabupaten Situbondo b. Program Pemerintah Daerah dalam pengembangan wisata Kabupaten Situbondo c. Gambaran umum Objek Wisata Tampora d. Proses kolaborasi pengembangan Objek Wisata Tampora e. Informasi stakeholder f. Peran Dinas Pariwisata g. Pelaksanaan kolaborasi
7	Bapak Medi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan-kegiatan rapat koordinasi b. Informasi CSR c. Peran Dinas Pariwisata d. Proses kolaborasi

8	Bapak Firdaus	a. Informasi pelaksanaan kolaborasi
9	Bapak Azis	a. Pembangunan kios pedagang b. Informasi Wisata
10	Lailatul Rohaniyah	a. Tanggapan mengenai Objek Wisata Tampora
11	Ika Rahmawati	a. Tanggapan mengenai Objek Wisata Tampora
12	Yulia Astutik	a. Tanggapan mengenai Objek Wisata Tampora
13	Puji Lestari	a. Tanggapan mengenai Objek Wisata Tampora

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2019)

2. Data Sekunder

Data Sekunder digunakan sebagai pendukung dari data primer. Sumber data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari hasil dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mendapatkan data *masterplan*, karena pihak Perhutani tidak menemukan data tersebut atau hilang. Meskipun demikian peneliti berhasil mendapat beberapa data sekunder yang dapat peneliti gunakan dalam penelitian ini. Berikut disajikan data sekunder yang didapatkan peneliti selama penelitian.

Tabel 3.3 Hasil data sekunder penelitian

No	Sumber Data	Data Sekunder yang diperoleh
1	Perum Perhutani KPH Probolinggo	<ul style="list-style-type: none"> a. Perjanjian Kerjasama Perum Perhutani KPH Probolinggo dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Waana Wisata Pantai Tampora b. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Probolinggo Tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan Hutan c. Undangan-undangan rapat koordinasi dalam proses kolaborasi pengembangan Objek Wisata Tampora d. Peta letak geografis Objek Wisata Tampora e. Laporan pendapatan tiket masuk Wisata
2	Pemerintah Desa	a. Peta Wilayah Desa Kalianget

	Kalianget	b. Monografi Desa Kalianget c. RPJMDes Kalianget tahun 2014-2019
3	Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo	a. Data Kunjungan Wisata Kabupaten Situbondo b. Undangan-undangan rapat koordinasi dalam proses kolaborasi
4	Sekretaris Pokdarwis	a. Struktur kepengurusan pokdarwis

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2019)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:23) menjelaskan bahwa teknik dan alat pengumpulan data merupakan cara dan instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket atau pengukuran. Teknik pengumpulan data merupakan langkah dasar dalam penelitian karena tujuan utama dilakukan penelitian yaitu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian. Menurut Lofland dan Lofland dalam Basrowi dan Suwandi (2008:169) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara melihat dengan dekat keadaan objek penelitian atau mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:221) observasi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu : observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar, serta observasi tak berstruktur.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi sistematis. Menurut Usman dan Akbar (2009:54) teknik observasi partisipasi merupakan teknik

observasi yang observer terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Sedangkan pengertian teknik observasi sistematis menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangka yang memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya. Pengamatan secara langsung dan membuat kerangka observasi terlebih dahulu untuk mengamati bagaimana

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan dan tanya jawab dengan maksud atau tujuan tertentu dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Moleong (2002:135) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

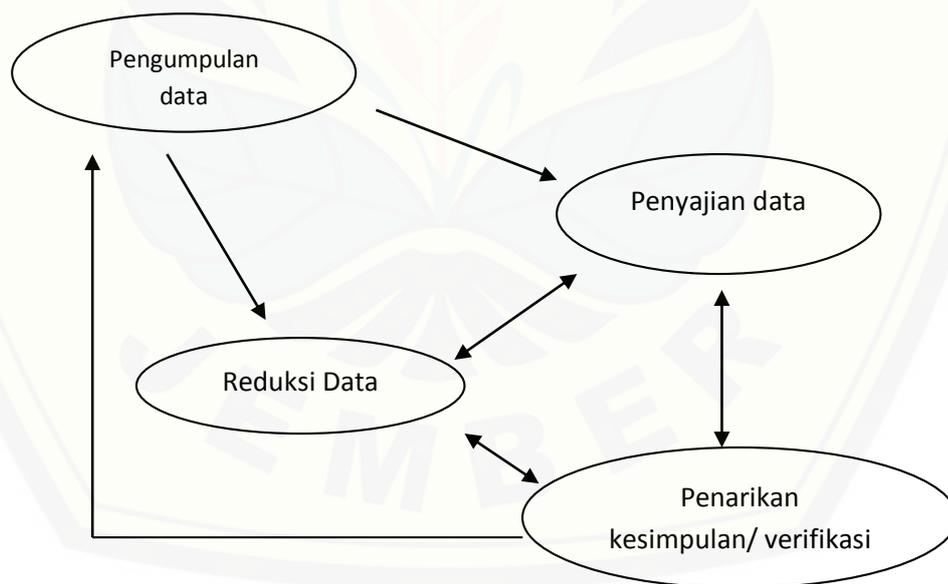
Metode penelitian data yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*indepth interviews*) dimana penggunaan *indepth interviews* sangat signifikan dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi masing-masing individu terhadap fenomena yang sedang diteliti. (Menurut Bandur, 2016:108) Wawancara mendalam (*indepth interviews*) terdiri atas *unstructured interviews* dan *semi-structured interviews*. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semistruktur, yang berarti pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara dilakukan dengan bebas namun tetap terstruktur dengan jelas dan sesuai dengan topik penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara, seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Usman dan Akbar (2003:73) mendefinisikan dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengambil data yang berupa dokumen-dokumen atau surat-surat yang berada dilokasi peneliti. Ada beberapa dokumentasi yang perlu peneliti lampirkan. Seperti foto kegiatan kerja, dokumentasi, struktur organisasi dan lain-lain. dari dokumen yang didapat, kemudian peneliti mengembangkan sesuai kebutuhan dalam penelitian.

3.7 Metode Analisi Data

Menurut Patton (dalam Moleong, 2002:103) analisis data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Komponen analisis data kualitatif digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data
Sumber : Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:340)

1. Tahap Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2008:247) reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal penting, dicari tema dan polanya. Menurut Mathew dan Michael (1992:16) reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai macam cara melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya

2. Tahap Penyajian Data/ Analisis Data Setelah Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. *Display* adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Miles dan Huberman (1984) memperkenalkan dua macam format, yaitu : diagram konteks (*context chart*) dan matriks. Penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan- tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial dimana seseorang berfungsi (ruang kelas, sekolah, departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal), sebagai ilustrasi dapat dibaca Miles dan Huberman (1984:133).

Miles and Huberman (1984) menyatakan : *”the most frequent form of display data for qualitative research data in the post has been narrative text”*/yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

3.8 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian merupakan hal penting karena menentukan hasil penelitian yang dapat dipercaya atau tidak. Menurut Moleong (2006:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi sebuah bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai teknik pemeriksaan keabsahan yang harus dipelajari oleh peneliti dalam membuktikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Teknik pemeriksaan keabsahan data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (Derajat Kepercayaan)	1. Perpanjangan Keikutsertaan
	2. Ketekunan Pengamatan
	3. Triangulasi
	4. Pengecekan Sejawat
	5. Kecukupan Referensial
	6. Kajian Kasus Negatif

Keteralihan Kebergantungan Kepastian	7. Pengecekan Anggota
	8. Uraian Rinci
	9. Audit Kebergantungan
	10. Audit Kepastian

Sumber : Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik keabsahan data di atas, penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2012:330). Selanjutnya menurut Moleong (2012:323), triangulasi dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut :

- a. mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- b. mengumpulkan data dan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber
- c. menggunakan berbagai macam metode agar kepercayaan data dapat dilakukan.

Teknik ini dapat dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat atau pandangan orang lain, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari peneliti mengenai kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan Destinasi Wisata Tampora dilakukan oleh beberapa pihak di antaranya, perhutani sebagai pemilik lahan, POMI sebagai Corporate Social Responsibility (CSR), Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo serta masyarakat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai kepanjangan dari Dinas Pariwisata
2. Kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora dilakukan melalui empat tahap kolaborasi yaitu *assesment*, *initiation*, *deliberation* dan *implementation*. Dalam kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora, tahap *assesment*, *initiation* dan *deliberation* telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan *colaborative governance* dan menghasilkan perjanjian kerjasama antara Perhutani dan Dinas Pariwisata yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi. Diawali dari tahap identifikasi (*assesment*), kedua belah pihak telah melakukan penilaian apakah kolaborasi tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak, telah mengetahui bagaimana kondisi awal Tampora, dan menentukan siapa saja yang akan menjadi stakeholder dalam kolaborasi tersebut. Tahap selanjutnya yaitu tahap inisiasi (*initiation*), dalam tahap ini dilakukan kegiatan rapat stakeholder yang terlibat yaitu perhutani, Dinas Pariwisata, dan Pokdarwis untuk membahas perjanjian kerjasama, hal apa saja yang dibutuhkan dalam kerjasama tersebut, membangun kelompok kerja dan proses desain. Kemudian tahap ketiga adalah tahap deliberasi (*deliberation*) yaitu dengan suatu perjanjian kerjasama yang menyatukan stakeholder yang telah disepakati bersama oleh Perhutani dan Dinas Pariwisata. Dalam tahap deliberasi terdapat pembagian tugas dan kewajiban masing-masing stakeholder sesuai bidangnya yang telah berpedoman pada suatu perjanjian kerjasama. Setelah ketiga tahap tersebut, tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan (*implementasi*). Tahap ini menjadi fokus peneliti dalam penelitian

ini. Tahap pelaksanaan merupakan tahapan terakhir dalam *collaborative governance*, tahap inilah yang menentukan apakah kolaborasi tersebut dapat terus dilangsungkan atau justru sebaliknya.

3. Pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora belum seluruhnya terlaksana. Kegiatan pengembangan seperti pembangunan sarana dan promosi telah dilaksanakan, namun kegiatan pengelolaan seperti pengelolaan tiket, kebersihan dan keamanan, monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara kolaboratif.

4. Kendala yang terjadi selama kolaborasi pengembangan wisata Tampora adalah masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dalam kolaborasi tersebut, keterbatasan aktifitas promosi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora, adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Pembangunan sarana dan prasarana yang ada harus disertai pemeliharaan agar tetap terjaga kebersihannya.
2. Perlu adanya komunikasi yang dibangun dengan baik antar stakeholder dengan cara adanya forum-forum diskusi agar setiap stakeholder dapat menyampaikan kesulitan atau masalah-masalah yang timbul dalam kolaborasi sehingga akan timbul rasa saling percaya dan saling memiliki terhadap Destinasi Wisata Tampora.
3. Para stakeholder perlu meningkatkan komitmen agar dapat menjalankan tugas dan perannya masing-masing yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anthon Sukahar, 1995. *Ekosistem Pesisir Karakteristik dan Prospeknya Untuk Pembangunan Kepariwisata Alam. Dalam Chafid Fandeli (Ed) Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty
- Chrislip, D, D (2002). *The collaborative leadership fieldbook: A guide for citizens and civic leaders*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Eddi Wibowo dkk. 2004. *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance*. Yogyakarta : YPAPI
- Fandeli, Chafid, 1995. *Potensi Obyek Wisata Alam. Dalam Chafid Fandeli (Ed) Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty
- Friedman, Andrew L. dan Samantha Miles. 2006. *STAKEHOLDERS: Theory and Practice*. New York: Oxford University Press
- Hadinoto, Kusudianto, 1996. *Perencanaan Pengembangan Distinasi Pariwisata*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press)
- Hardiwinoto, Suryo, 1995. *Sumberdaya Hutan Untuk Kepariwisata Alam. Dalam Chafid Fandeli (Ed) Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty
- Hardi Warsono. 2009. *Kolaborasi dan Kerjasama Antar Daerah. Dalam Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (Ed) Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Joyosuharto, Sunardi, 1995. *Aspek Ketersediaan (Supply) dan Tututan Kebutuhan (Demand) Dalam Pariwisata. dalam Dalam Chafid Fandeli (Ed) Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty

- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantana Global*. Jakarta : Rineka Cipta
- Lakoni,M., 1995. *Jenis Pengusahaan isata Alam. Dalam Chafid Fandeli (Ed) Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty
- Mangkunegara,Anwar Prabu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Milles, M.B dan Huberman A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong.2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja.
- Morse,R.S.(2008).*Developing public leaders in an age of collaborative governance*. In R.S.Morse & T.F.Buss (Eds.). Innovation in public leadership development .Armonk,NY:M.E.Sharpe.
- Osborne, David & Ted Gaebler, Ted. 1992, *Reinventing Government : Haw the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Massachusetts. Addison-Wesly Publishing Company
- Pitana, I Gede dan I Ketut SD. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Publishing.
- Rosidi,Abidarin. & Fajriani, Anggraeni. 2013.*Reiventing Goverment*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sarundajang,S,H. 2005 b. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta : Kata Hasta
- Silalahi, Ulber.2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama
- Soekadijo, R.G, 2000. *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono.2011.*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*.Bandung:Alfabeth
- Sugiyono.2008.*Metode Penelitian Administrasi: dilengkapi metode R&D*.Bandung:Alfabeth
- Sunaryo, Bambang.2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata(Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*.Yogyakarta:Gava Media
- Universitas Jember.2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.Jember: Jember University Press
- Usman, Husaini, Akbar, Purnomo S.2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta:Bumi Aksara

Wahab, Salah.1996. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta:PT.Pertja
Wardiyanta.2006.*Metode Penelitian Pariwisata*.Yogyakarta:Penerbit Andi

Wardiyanta.2006.*Metode Penelitian Pariwisata*.Yogyakarta:Penerbit Andi

Yoeti, H. Oka A. 2000. *Ekowisata : Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*.
Jakarta : PT Pertja

Jurnal

Andy Ramses M. 2002. *Dimensi-Dimensi Pebentukan Daerah Otonom*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 18 hal 3 – 12

Ansell,Chris, Alison Gash.2007, *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Oxford University Press On Behalf Of The Journal Of Public Administration Research and Theory. JPART 18:543-571

Ansell.C& Gash, A(2008).*Collaborative governance in theory and practice*.
Journal of Public Administration Research and Theory. 18, 543-571

Baskoro, BRA. (2008), *Membangun Kota Pariwisata, Jurnal Kepariwisata Indonesia*. Vol.3

Baskoro, BRA. (2008), *Membangun Kota Pariwisata, Jurnal Kepariwisata Indonesia*. Vol.3

BO Svenson, Sara Nordin dan Arvin Flagestad.2005. *A Governance Perspective on Development Exploring Partnership, Cluster and Inovation Systems*.
Tourism Review, Vol.60 Iss:2, pp 32-37

Freeman, R. Edward dan David L. Redd. 1983. *Stocholders and Stakeholders on Corporate Governance*. California:California Management Review

Kholiq Azhari, Abdul.2019.*Kolaborasi dan Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Alam: Kendala dan Prospeknya d iEra Otonomi Daerah*.

Morse,Ricardo S, and John B. Stephens.2012. *Teaching Collaborative Governance Phases, Competencies, and Cased Based Learning*. *Journal of Public Affairs Education*. JPAE 18 (3), 565-584.

Nuryanti, Wiendu, 1995. *Perencanaan Pembangunan Regional dan Kawasan Untuk Kepariwisata Alam*. dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Libery

Rawlins, Brad L. 2006. *Prioritizing stakeholders for public relations*. Brigham Young University

Rauf, Maswadi, 2002. *Pemerintah Daerah dan Konflik Harizontal*. Jurnal Ilmu Politik No. 18 Hal. 27-36

Rudiyanto, 2003. *Pengaruh Nilai Persepsi Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Ekuitas Destinasi Sebagai Moderasi Pada Wisata Kesehatan SPA DKI Jakarta*. Jurnal HOSPITOUR. Volume IV No. 1 April hal.1-33

Thomson, Ann Marie dan James L. Perry. 2006. *Collaboration Processes: Inside the Black Box*. Public Administration Review. Halaman 20-32.

Peraturan Perundang-undangan

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Probolinggo tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Nomor: 188/0266/431.004.1/2018 Nomor: 243/KSB/PBO/Divre Jatim/2018

Perjanjian Kerja Sama Perum Perhutani KPH Probolinggo dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo tentang Pengembangan dan Pengelolaan Wana Wisata Pantai Tampora Kabupaten Situbondo Nomor: 244/PKS/PBO.Divre Jatim/2018 Nomor: 188/281.1/431.220.2.2/2018

Undang-undang Kepariwisataaan No 9 Tahun 1990

Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Internet/e-book

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.2018.www.situbondokab.bps.go.id

<http://www.atobasahona.com/2016/07/pengertian-objek-wisata.html#ixzz4jmNHU9Ba>

<http://ayoberkunjung14.blogspot.co.id/2015/11/pantai-tampora.html>

http://ardhikurniawan.blogspot.co.id/p/blog-page_23.html

Pusat Data Kabupaten Situbondo.2018.<https://pusda.situbondokab.go.id/8keldata/1/381>

www.kemenpar.go.id/asp?c=117&id=1198 (2016)

www.situbondokab.bps.go.id

Lampiran 6.1 Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Jember

 **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 3226/UN25.3.1/LT/2018 15 Agustus 2018
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Situbondo
Di
Situbondo

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 2966/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

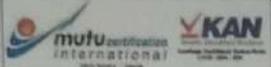
Nama : Nova Ladiana
NIM : 140910201018
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Kalimantan 18 No.5 Sumpersari-Jember
Judul Penelitian : "Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tampora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo"
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pariwisata Kab. Situbondo
2. Kantor Desa Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo
Lama Penelitian : 3 Bulan (20 Agustus-30 November 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.


a.d. Ketua Sekretaris II,
Dr. Susanto, M.Pd.
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth
1. Kepala Dispar Kab. Situbondo;
2. Kepala Desa Kalianget Kec Banyuglugur Kab. Situbondo;
3. Dekan FISIP Universitas Jember;
4. Mahasiswa ybs. ✓
5. Arsip.


CERTIFICATE NO : QMS-173

Lampiran 6.2 Surat Rekomendasi dari Bakesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. PB. SUDIRMAN KEL. PATOKAN TELP/FAX (0338) 671 927
 SITUBONDO 68312

Situbondo, 24 September 2018

Nomor : 070/478/431.305.2.2/2018
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :
 Sdr. 1. Kepala Dinas Pariwisata
 2. Kepala Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur
 Kabupaten Situbondo
 di -

SITUBONDO

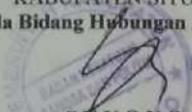
Menunjuk surat : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember
 Nomor : 3226/UN25.3.1/LT/2018
 Tanggal : 15 Agustus 2018
Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :
 Nama : NOVA LADIANA
 Alamat/HP : Kp. Kalak Rt.01/01 Desa Kalimas, Besuki, Situbondo/
 HP. 082 331656 749
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Instansi/Organisasi : Universitas Jember
 Kebangsaan : Indonesia
bermaksud mengadakan penelitian/survey/research/magang :
 a. Judul/tema : Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tempora Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo
 b. Tujuan : Penelitian untuk Penyusunan Skripsi
 c. Bidang : Pendidikan
 d. Penanggung Jawab : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
 e. Anggota/Peserta : -
 f. Waktu : September 2018 s/d Maret 2019
 g. Lokasi : Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga


SUYONO, SE
 Penata Tingkat I
 NIP. 19700127 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :
 1. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember;
 2. Sdr. Yang Bersangkutan;
 3. Arsip.

6.3 Surat Persetujuan Ijin Penelitian dari Perhutani



PERHUTANI

Nomor : 332 /016.5/Komper & Ptp/Divre Jatim Surabaya, 21 Nopember 2018
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
 Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
 Universitas Jember
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
 Telp./Fax. (0331)-326935, Fax. (0331)-326911

Menarik surat Saudara nomor 3226/UN25.3.1/LT/2018 tanggal 15 Agustus 2018 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menyetujui mahasiswa Saudara, a.n. :

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Mahasiswa	Program Studi
1.	Nova Ladiana	140910201018	Sistem Informasi

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur-KPH Probolinggo dalam rangka penelitian mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Jember dengan judul "Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tampora Desa Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo" selama 3 bulan pada, 20 Nopember 2018 s.d. Januari 2019.

2. Segala biaya yang timbul, akomodasi dan ijin kepada instansi terkait menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan hasil kegiatan untuk literatur perpustakaan Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.

4. Dalam hal permintaan data dll agar berkonsultasi dengan: KPH Probolinggo d/a. Jl. Soerojo No. 12 Probolinggo Telp. (0335)-421723, 421457, Fax. (0335) 421556.

Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KADIVRE
 Wakadivre Bid. Kelola SDH



JOKO SUNARTO, S.Hut
 PH.T. 19740117199609100

Tembusan Kepada Yth. :
 1. Kadivre Jawa Timur
 2. Administratur/KKPH Probolinggo

Unit A Jember Timur, Jl. Darmasari Rad. No. 19 Jember
 T. +62 31 821021 (Jember) F. +62 31 8211264

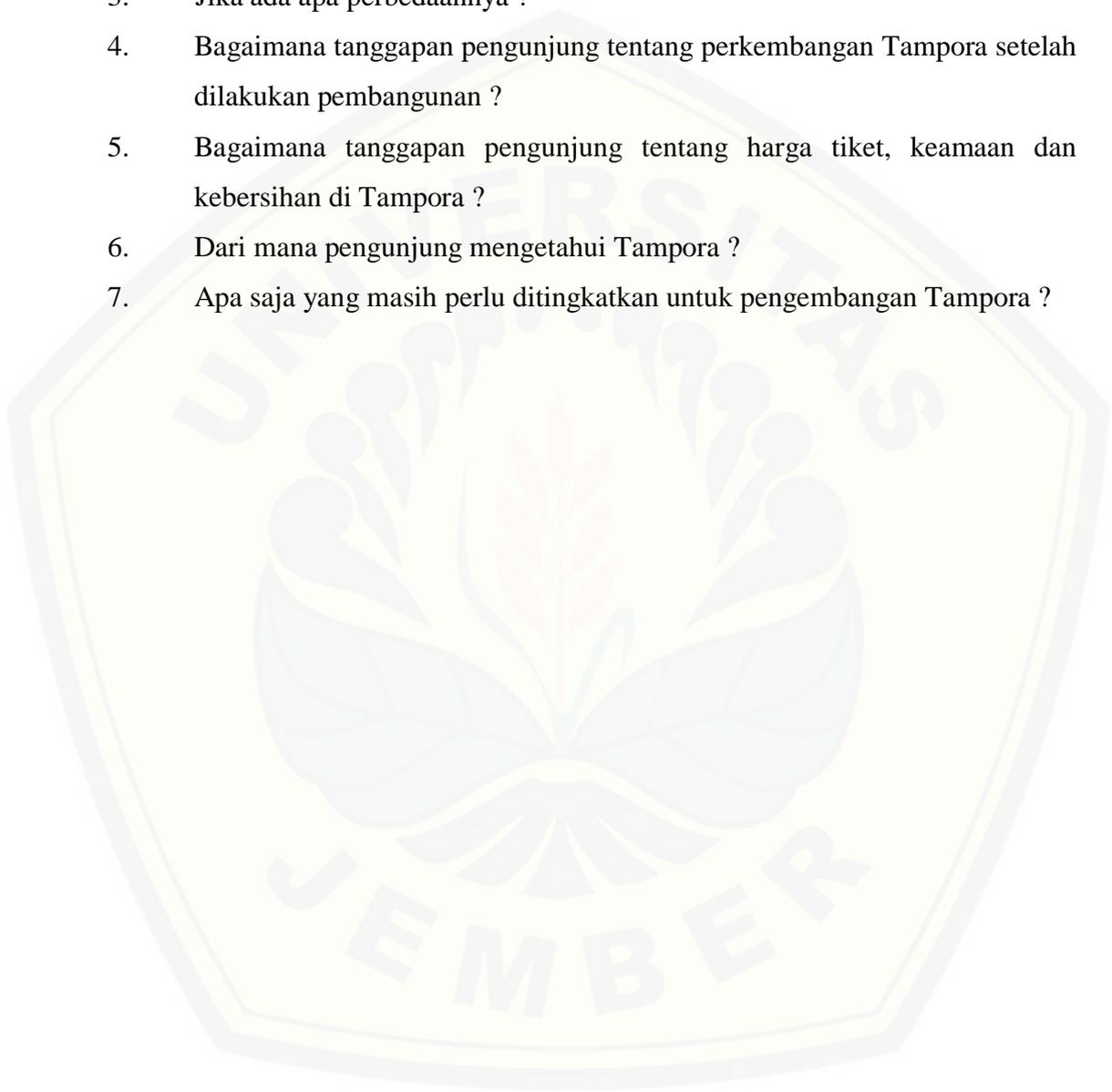
Lampiran 6.4 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Untuk Pemangku Kepentingan

1. Apakah kerjasama pengembangan Destinasi Wisata Tampora memang benar-benar dibutuhkan ?
2. Bagaimana kondisi awal Tampora ?
3. Siapa saja stakeholder dalam kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora ?
4. Apakah ada sponsor dalam pengembangan Tampora ?
5. Bagaimana cara mengikat stakeholder ? apakah ada perjanjian kerjasama ?
6. Bagaimana proses pembuatan perjanjian kerjasama ?
7. Bagaimana proses pengambilan keputusannya ?
8. Apa tujuan dilaksanakannya kolaborasi Pengembangan Tampora ?
9. Bagaimana proses kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tampora ?
10. Bagaimana pembagian hak dan kewajibannya ?
11. Bagaimana pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora ?
12. Apakah masing-masing stakeholder telah melaksanakan hak dan kewajibannya ?
13. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi ?
14. Apakah ada rapat rutin untuk membahas hasil kolaborasi ?
15. Apa kendala yang dihadapi selama proses kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tampora ?
16. Bagaimana tanggapan pokdarwis tentang kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Tampora ?
17. Apakah pokdarwis dilibatkan dalam perjanjian kerjasama ?
18. Bagaimana peran pokdarwis dalam pelaksanaan kolaborasi pengembangan Destinasi Wisata Tampora ?

Pedoman Wawancara Untuk Pengunjung

1. Mengapa memilih berkunjung ke Tampora ?
2. Adakah yang membedakan Tampora dengan Destinasi Wisata pantai lain ?
3. Jika ada apa perbedaannya ?
4. Bagaimana tanggapan pengunjung tentang perkembangan Tampora setelah dilakukan pembangunan ?
5. Bagaimana tanggapan pengunjung tentang harga tiket, keamanan dan kebersihan di Tampora ?
6. Dari mana pengunjung mengetahui Tampora ?
7. Apa saja yang masih perlu ditingkatkan untuk pengembangan Tampora ?



Lampiran 6.5 Dokumentasi Foto Penelitian



Supervisor Wisata Perhutani



Mandor Wisata Perhutani BPKPH Taman



Sekretaris Pokdarwis



Sekretaris Desa Kalianget



Banner Kegiatan Terak Mancorong



Pintu Masuk Pantai Tampora



Musholla



Pendopo



Gazebo



Playground

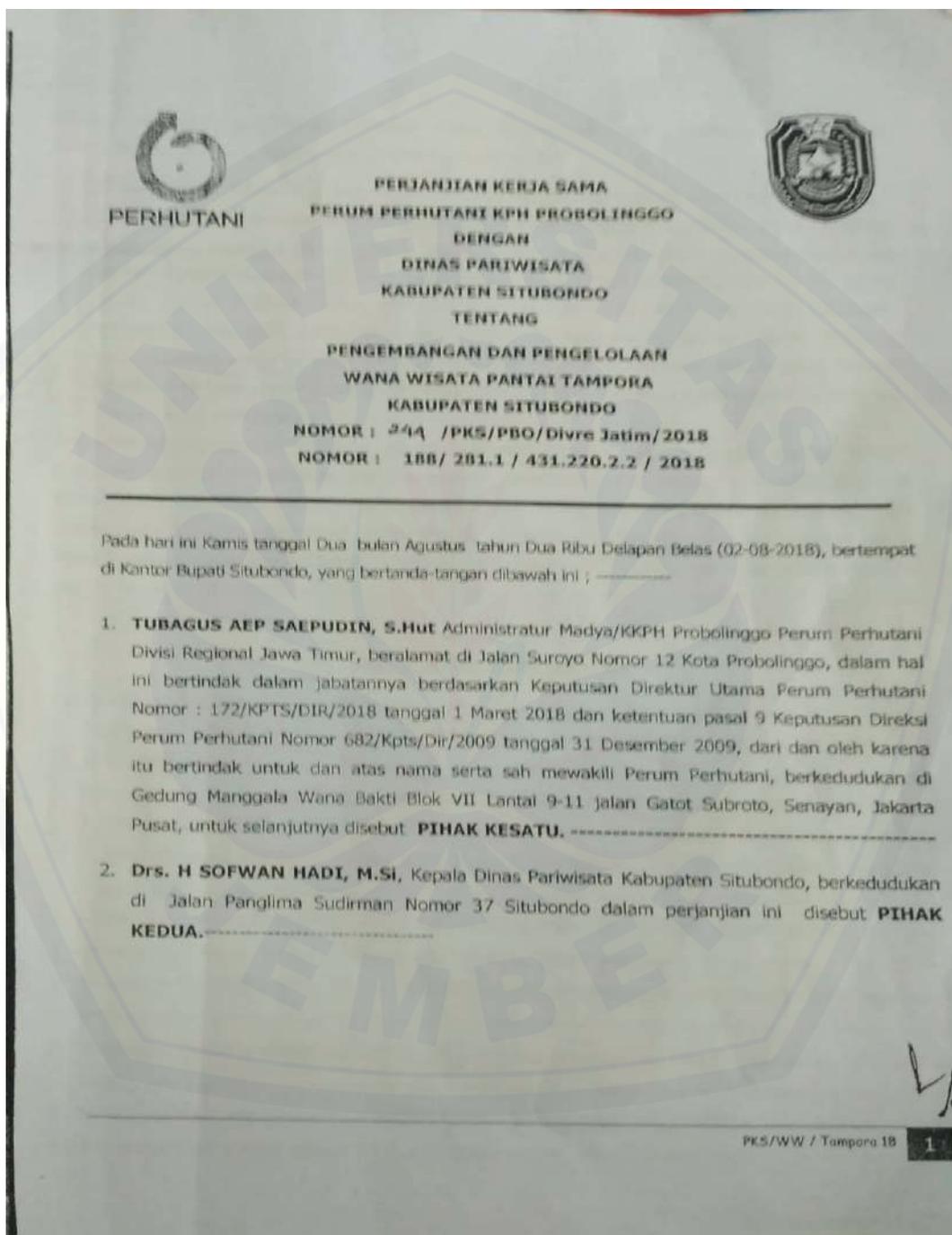


Tandon air



Toilet

Lampiran 6.6 Dokumen Perjanjian Kerjasama Pengembangan Destinasi Wisata Tampora



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang diberi tugas dan wewenang oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kawasan hutan dalam wilayah kerjanya;-----
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang diberi tugas dan wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kepariwisataaan yang wilayah kerjanya sebagian berada di kawasan hutan yang dikelola **PIHAK KESATU** yaitu masuk dalam wilayah kerja Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo ;-----

Berdasarkan kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Perum Perhutani tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Nomor 180/04/426.31/2018 Nomor : 233/KSB/Pbo-Divre Jatim/ 2018 pada tanggal 14 Mei 2018, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama pengelolaan Wana Wisata Tampora yang berada di dalam kawasan hutan negara yang dikelola **PIHAK KESATU** dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut : -

PASAL 1 **DASAR HUKUM PERJANJIAN**

Dasar Hukum Perjanjian ini adalah : -----

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;-----
2. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ; -----
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;-----
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan ;-----
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-----
6. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;-----
7. Peraturan Pemerintah Nomot 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;-----
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan ;-----

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; -----
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 ;-----
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara ;-----
12. Intruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata ;-----
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah ;-----
14. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung ; -----
15. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi ;-----
16. Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan No. P.6/VII-PKH/2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan ;-----
17. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/Kpst/Dir/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ;-----
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
20. Kesepakatan bersama antara Perhutani KPH Probolinggo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo nomor 188/0266/431.004.1/2018 dan nomor /KSB/PBO/Divre Jatim/2018

PASAL 2

PENGERTIAN – PENGERTIAN DASAR

1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap ;-----

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
3. Pengelolaan Sumberdaya Hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi;-----
4. PHBM (Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan (SDH) yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan Masyarakat Desa atau Perum Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan dengan Pihak Yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat Sumberdaya Hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional;-----
5. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan;-----
6. Masyarakat Desa Hutan (MDH) adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya;-----
7. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) adalah Kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya;
8. Pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) adalah pihak-pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yaitu Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor;-----
9. Wisata Alam (Wana Wisata) adalah objek dan daya tarik wisata alam di dalam kawasan hutan Perum Perhutani, baik di hutan lindung maupun hutan produksi dengan tidak mengubah fungsi kawasan hutan tersebut;-----

10. Usaha Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;-----
11. Keadaan kahar adalah Perubahan status kawasan, kebijakan yang lebih tinggi yang tidak bisa saling gugat, huru hara, perang, pemberontakan, bencana alam, blockade, epidemi, pemogokan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kabupaten, kebijakan moneter dan lain-lain kejadian di luar kekuasaan manusia yang langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan;-----
12. Wanprestasi adalah suatu cidera janji atau segala bentuk kelalaian yaitu tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban, terlambat melaksanakan kewajiban, serta pelaksanaan kewajiban tidak sesuai dengan perjanjian.-----

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya alam, perekonomian daerah, perekonomian masyarakat desa hutan, dan mengembangkan jasa lingkungan serta pariwisata alam, dalam bentuk kerjasama pengelolaan yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan aspek konservasi dan kelestarian hutan;-----
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk lebih meningkatkan pengembangan kepariwisataan daerah, daya guna dan hasil guna, serta produktivitas kawasan hutan disamping hasil hutan kayu dan non kayu, khususnya pemanfaatan jasa lingkungan hutan bagi **PARA PIHAK**.-----

PASAL 4

OBJEK, LOKASI DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Objek perjanjian ini adalah pemanfaatan jasa lingkungan dengan pengelolaan wana wisata pantai tampona yang berada didalam wilayah kerja **PIHAK KESATU**.-----
- (2) Lokasi Perjanjian ini adalah kawasan hutan Lapangan Dengan Tujuan Istimewa (LDTI) petak 34c seluas 2,4 Ha dan petak 34e seluas 0,2 Ha wilayah kerja Resort Pangkuan Hutan (RPH) Taman Barat, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Taman Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo, masuk wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo ;-----

- (3) Ruang Lingkup Perjanjian:-----
- a. Penyusunan masterplan pengembangan Wana Wisata Tampora;-----
 - b. Pembangunan sarana wisata;-----
 - c. Pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan;-----
 - d. Pengelolaan Tiket bersama;-----
 - e. Promosi dan pemasaran;-----
 - f. Peningkatan SDM pengelola Wana Wisata Tampora.-----

PASAL 5

STATUS DAN PENGUASAAN KAWASAN

- (1) Lokasi sebagaimana tersebut pada pasal 4 perjanjian ini tetap berstatus sebagai Kawasan Hutan Negara yang mempunyai fungsi sebagai hutan lindung ;-----
- (2) Penguasaan atas kawasan hutan tersebut tetap berada didalam penguasaan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Hak pengelolaannya berada pada Perum Perhutani ;---

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :-----
 - a. Menerima manfaat berupa bagi hasil dari pengelolaan Wana Wisata Tampora sebagaimana ketentuan pada pasal 9 (sembilan) perjanjian kerjasama ini .-
 - b. Memperoleh data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan pelaksanaan Perjanjian;-----
 - c. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam hal ini LMDH Wirabrata dalam rangka pengelolaan prasarana pendukung wisata diluar tiketing ;-----
 - d. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap semua kegiatan pengelolaan Wana Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini ;-----

e. Melakukan penutupan sementara dan atau tetap terhadap obyek Perjanjian atas kesepakatan PARA PIHAK apabila berpotensi terjadi bencana alam dan/atau sebab lainnya.-

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk : -----

- a. Memanfaatkan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dalam Perjanjian ini untuk keperluan pengembangan Wana Wisata Tampora dan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Menerima manfaat berupa bagi hasil dari pengelolaan Wana Wisata Tampora sebagaimana ketentuan pada pasal 9 (sembilan) perjanjian kerjasama ini.--
- c. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap semua kegiatan pengelolaan Wana Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini ; -----
- d. Melakukan penutupan sementara dan atau tetap terhadap obyek Perjanjian atas kesepakatan PARA PIHAK apabila berpotensi terjadi bencana alam dan/atau sebab lainnya.-

(4) **PIHAK KESATU** Berkewajiban untuk : -----

- a. Menyediakan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini untuk dikelola secara bersama dengan **PIHAK KEDUA** ; -----
- b. Menugaskan personil untuk melaksanakan pengelolaan obyek perjanjian secara berkelanjutan ; -----
- c. Bersama **PARA PIHAK** melindungi dan mengamankan sumber daya hutan yang terletak dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2) perjanjian ini dan disekitarnya secara berkelanjutan;-----
- d. Bersama **PARA PIHAK** Memelihara Alur, Batas Hutan/Batas Area Obyek Perjanjian dan ikut membantu menjaga fasilitas Obyek Wisata;-----
- e. Memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi pada lokasi Perjanjian dan di sekitarnya;-----
- f. Bersama **PARA PIHAK** Memberikan fasilitas pelaksanaan perlindungan masyarakat apabila terjadi bencana alam pada obyek dalam perjanjian ini termasuk upaya kesiagaan (Mitigasi Bencana, Pemasangan Plang Peringatan dan lain-lain) dan penanggulangan bencana, rekonstruksi dan penanganan pengunjung yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo dan Polisi Hutan teritorial, Polisi Hutan Mobil Perum Perhutani KPH Probolinggo ;-----
- g. Mengasuransikan semua petugas dan pengunjung Wana Wisata Tampora dan membayar asuransi kecelakaan pengunjung dalam lokasi obyek kerjasama sebagaimana perjanjian kerjasama ini, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan penyelenggara asuransi yang diatur dalam perjanjian tersendiri;-----

- (5) **PIHAK KEDUA** Berkawajiban untuk ; -----
- a. Menyampaikan Masterplan pengembangan Wana Wisata Tampora kepada **PIHAK KESATU**; -----
 - b. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi Sarana Fisik Obyek Wana Wisata Tampora; ---

 - c. Menugaskan personil untuk melaksanakan pengelolaan obyek perjanjian secara berkelanjutan ; -----
 - d. Mencetak dan melaksanakan porporasi tiket masuk Wana Wisata Tampora, dengan tarip sebagaimana ketentuan pada pasal 7 ayat (4) perjanjian ini ; -----
 - e. Bersama **PARA PIHAK** melindungi dan mengamankan sumber daya hutan pada lokasi Perjanjian dan di sekitarnya secara berkelanjutan; -----
 - f. Bersama **PARA PIHAK** memelihara Alur batas Hutan/batas areal obyek yang dikerjasamakan;-----
 - g. Bersama **PARA PIHAK** melaksanakan konservasi dan rehabilitasi lahan pada lokasi dan sekitar lokasi yang menjadi obyek perjanjian secara berkelanjutan, dengan bimbingan teknis dari **PIHAK KESATU**; -----
 - h. Bersama **PARA PIHAK** Memberikan fasilitas pelaksanaan perlindungan masyarakat apabila terjadi bencana alam pada obyek dalam perjanjian ini termasuk upaya kesiagaan (Mitigasi Bencana, Pemasangan Plang Peringatan dan lain-lain) dan penanggulangan bencana, rekonstruksi dan penanganan pengunjung yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Situbondo, dan Polisi Hutan teritorial, Polisi Hutan Mobil Perum Perhutani KPH Probolinggo ;-----
 - i. Mengasuransikan semua petugas dan pengunjung Wana Wisata Tampora dan membayar asuransi kecelakaan pengunjung dalam lokasi obyek kerjasama sebagaimana perjanjian kerjasama ini, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan penyelenggara asuransi yang diatur dalam perjanjian tersendiri ; -----

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Wana Wisata Tampora sebagaimana ruang lingkup perjanjian pada pasal 4 ayat (3) dilakukan secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini ; -----
- (2) Dalam Pelaksanaannya melibatkan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) bersama Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang diatur lebih lanjut bersama **PARA PIHAK**; -----
- (3) Besaran tiket masuk adalah sebagai berikut : -----
 - a. Tiket Masuk pada hari Biasa (Senin s/d Jum'at) termasuk asuransi Jiwa dari Amana Gita.
 - Wisatawan dalam Negeri (Lokal) adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per orang ; --
 - Wisatawan Luar Negeri (Manca Negara) adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang -----
 - b. Tiket Masuk pada hari Libur (Sabtu s/d Minggu) dan Hari Besar Lainnya termasuk asuransi Jiwa dari Amana Gita
 - Wisatawan dalam Negeri (Lokal) adalah sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per orang ; -
 - Wisatawan Luar Negeri (Maca Negara) adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per orang -----
 - c. Tarif Asuransi Amanah Gita adalah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang diambilkan dari hasil penjualan tiket masing-masing Pihak ; -----

PASAL 8
BIAYA OPERASIONAL

Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional pengelolaan Wana Wisata Tampora dan menjadi tanggung jawab dari **PARA PIHAK**. -----

PASAL 9
BAGI HASIL USAHA

(1) Bagi hasil usaha dari penjualan tiket masuk Wana Wisata Tampora setelah dikurangi biaya operasional, Asuransi Jiwa Amana Gita dan Pajak, disepakati sebagai berikut : -----

- **PIHAK KESATU** sebesar 40% ; -----
 - **PIHAK KEDUA** sebesar 60% ; -----
- (2) Hasil penjualan tiket dalam setiap hari, dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh petugas dari masing-masing PIHAK ; -----

PASAL 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh **PARA PIHAK** setiap 2 (dua) bulan sekali selama jangka waktu Perjanjian; -----
- (2) Hasil monitoring digunakan sebagai dasar untuk saran/masukan bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian; -----
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Tim yang dibentuk oleh **PARA PIHAK** selama jangka waktu Perjanjian ; -----

PASAL 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 23 Mei 2020;-----
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu perjanjian telah selesai kecuali dilakukan perpanjangan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** ; -----
- (3) Dalam hal Perjanjian ini akan diperpanjang, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian;-----

- (4) Dalam hal jangka waktu perjanjian ini berakhir masih ada hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, maka dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikannya;-----

PASAL 12

LARANGAN

- (1) **PARA PIHAK** dilarang mengalihkan kepada pihak lain manapun baik sebagian maupun secara keseluruhan obyek Perjanjian ; -----
- (2) **PARA PIHAK** dilarang menjaminkan atau mengagunkan baik sebagian maupun keseluruhan obyek perjanjian ; -----
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang membuat bangunan yang bersifat permanen di luar *master plan* pengembangan Wana Wisata Tampora yang telah disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** ; ---
- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang mengubah, memindahkan, merusak dan atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan yang ada pada kawasan hutan yang dikerjasamakan;-----
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak boleh merubah status dan fungsi kawasan hutan yang menjadi obyek Perjanjian ini. -----

Pasal 13

WANPRESTASI

PIHAK KESATU atau **PIHAK KEDUA** dinyatakan wanprestasi apabila : -----

- (1) Melanggar salah satu ketentuan dalam Perjanjian;-----
- (2) Tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini;--
- (3) Terlambat memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini ;-----
- (4) Memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.-----

Pasal 14

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila salah satu pihak melakukan *wanprestasi* maka pihak lainnya berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; -----

- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu melakukan teguran berupa surat peringatan kepada PIHAK yang melakukan *wanprestasi* sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu sebelum memutuskan perjanjian;-----
- (3) Segala biaya yang timbul akibat adanya pemutusan perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pemutusan perjanjian;-----
- (4) Pemutusan perjanjian akibat adanya PIHAK yang melakukan *wanprestasi*, tidak menghilangkan kewajiban PIHAK yang melakukan *wanprestasi* tersebut.-----

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila **PARA PIHAK** gagal memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban atau ketentuan seperti yang diatur dalam Perjanjian ini, yang menimbulkan kerugian pada pihak lainnya yang terjadi sebagai akibat hal-hal di luar kemampuannya dan dapat dinyatakan sebagai keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** tidak memiliki hak untuk saling menuntut ;-----
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar tersebut pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar memberitahu pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keadaan kahar di sertai bukti-bukti yang sah yang di keluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang ;-----
- (3) Atas pemberitahuan dari pihak yang mengalami keadaan kahar pihak lain akan menyetujui secara tertulis keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tersebut;-----
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh pihak mengalami keadaan kahar, pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberi jawaban maka pihak tersebut dianggap menyetujui adanya keadaan kahar tersebut ;-----
- (5) Apabila terjadi keadaan kahar, **PARA PIHAK** sepakat membicarakan dan mencari jalan penyelesaian.-----

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** akibat Perjanjian ini, maka akan di selesaikan secara musyawarah untuk mufakat;-----

(2) Apabila penyelesaian perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** memilih dan sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Situbondo.-----

Pasal 17
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini ;-----
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan ditinjau kembali dan akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Pasal 18
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

PIHAK KEDUA,



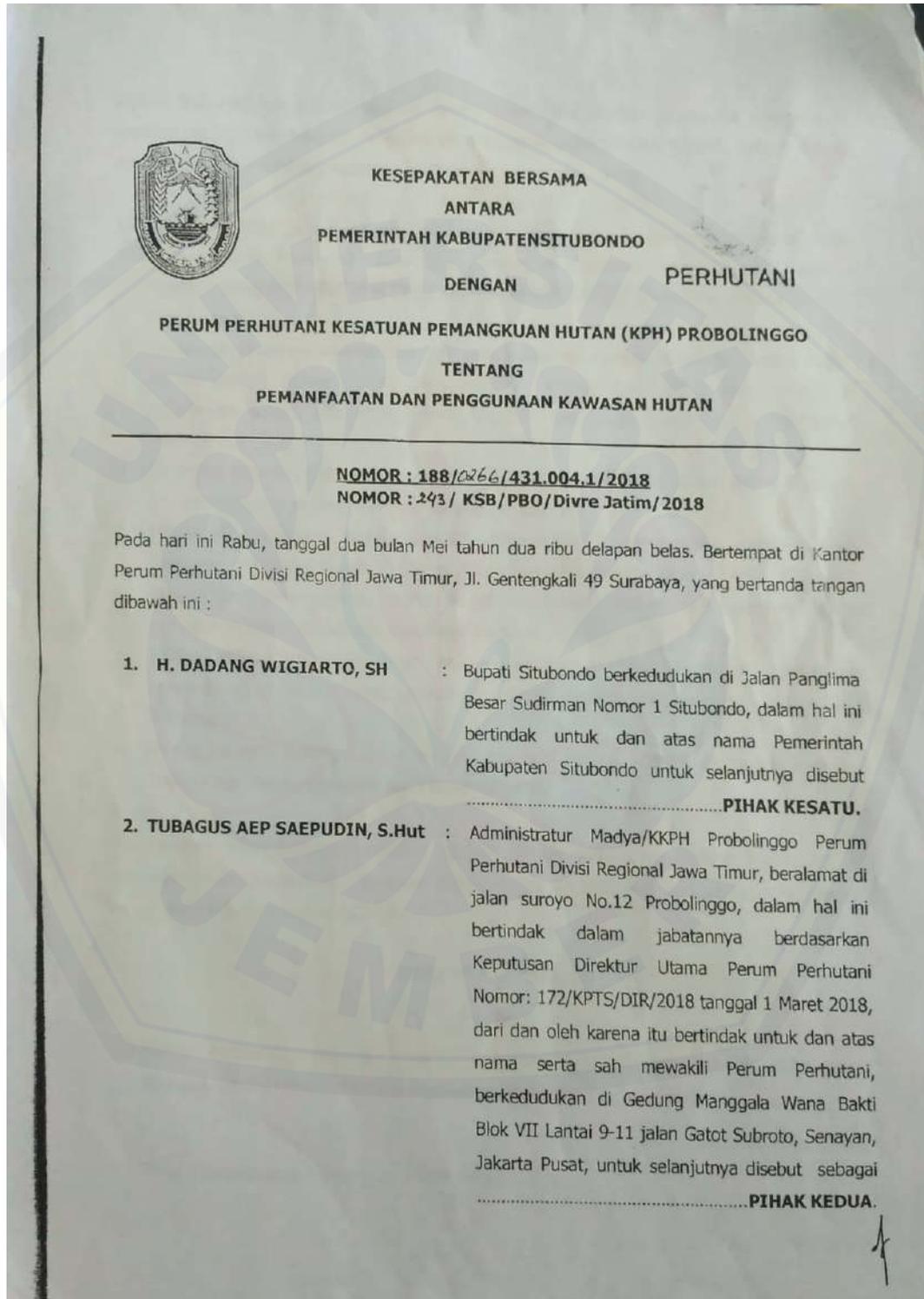
Drs/H SOFWAN HADI, M.Si

PIHAK KESATU,



TUBAGUS AEP SAEPUDIN, S.Hut

Lampiran 6.7 Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan



- a. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan hutan di Wilayah Kabupaten Situbondo ;
- b. Menambah pendapatan **PARA PIHAK** ;
- c. Mensinergikan kegiatan pembangunan non Kehutanan dalam kawasan hutan.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut :

- (1) Pemanfaatan kawasan hutan meliputi ;
 - a. Industri Pariwisata dan ekonomikreatif;
 - b. Pemanfaatan Sumber Mata Air ;
 - c. Pemanfaatan alur/jalan ;
 - d. Pemanfaatan lahan untuk swasembada ketahanan pangan ;
- (2) Penggunaan kawasan hutan meliputi :
 - a. Penanaman pemasangan pipa dan/atau kabel;
 - b. Pembangunan anembung;
 - c. Tempat pengelolaan sampah;
 - d. Peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi ;
 - e. Pemasangan jalur listrik masuk desa (bukan SUTT/ SUTET);
 - f. Pembangunan ba penampung air.

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional dan pembiayaan akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** akan menunjuk Perangkat Daerah dan/ atau BUMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kewenangan **PARA PIHAK** ;

- (4) Dalam pelaksanaan kerjasama, dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain yang ditunjuk atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** ;

PEMBIAYAAN

PASAL 4

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

JANGKA WAKTU

PASAL 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Kesepakatan Bersama ini tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dan/atau tidak dilakukan perpanjangan maka Kesepakatan Bersama ini batal demi hukum.

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

PASAL 6

Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai penafsiran dalam pelaksanaan, syarat-syarat dan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersamaini akan ditetapkan di kemudian hari dan dituangkan secara

tertulis dalam suatu Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PENUTUP

Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipatuhi bersama dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,



TUBAGUS AEP SAEPUDIN, S.Hut H. DADANG WIGIARTO, SH

**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. PR. Sudirman No.01 Telp. (0338) 671161 Fax (0338) 671885
SITUBONDO 68312

Situbondo, 17 Mei 2018

Nomor : 556/1526 / 431.220.2.2 / 2018
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : **Penyampaian Hasil Pembahasan
Draft Perjanjian Kerjasama (PKS)**

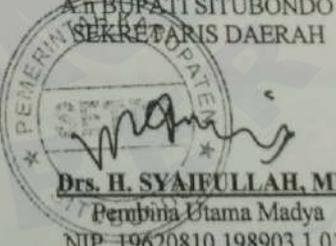
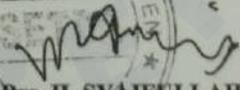
Kepada.
Yth. Sdr. Administratur KPPH Probolinggo
Di -- **PROBOLINGGO**

Menindaklanjuti Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disampaikan KPH Probolinggo kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo tentang Pengelolaan Wana Wisata Tampora, dan setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Kerjasama Pemerintah Kabupaten Situbondo tanggal 15 Mei 2018 bertempat di Ruang Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, dapat kami sampaikan Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapatnya untuk segera ditindaklanjuti dan apabila Saudara berkenan akan kami undang untuk membahas Perjanjian Kerjasama (PKS) dimaksud guna mencapai kesepakatan bersama dengan Tim Kerjasama Kabupaten Situbondo, terkait dengan waktu pelaksanaan pembahasan bersama, kami undang Saudara untuk hadir pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Mei 2018
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Baluran Pemkab Situbondo

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**BUPATI SITUBONDO**
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620810 198903 1 019

Tembusan disampaikan kepada

1. Bupati Situbondo (sebagai Laporan)
2. Ka. Divre Perhutani Jawa Timur
3. Arsip

Jl. PB. Sudirman No. 37 Telp. (0338) 676072 Fax (0338) 676070
SITUBONDO – 68312

Situbondo, 19 Februari 2018

Nomor : 556/088 /431.215.2.1/2018
Sifat : Penting
Lampiran : ---
Perihal : Rapat Koordinasi Pengelolaan
Wana Wisata Pantai Tampora

Kepada Ka. Petum Perhutani
Yth. Sdr. KPH PROBONGGO
di - **SITUBONDO**

Dalam rangka menyambut Tahun Kunjungan Wisata Kabupaten Situbondo Tahun 2019 dan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Tahun 2018 ke Destinasi Wana Wisata Pantai Tampora, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo akan mengadakan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Februari 2018
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kepala Dinas Pariwisata Kab. Situbondo
Acara : Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan Destinasi Wana Wisata Pantai Tampora

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SITUBONDO**

Drs. H. SOFWAN HADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 199202 1 002

Disampaikan Kepada Yth.
Bupati Situbondo (sebagai laporan);
Arsip.

Lampiran 6.9 Laporan Pendapatan Wisata Tampora

LAPORAN PENDAPATAN WISATA PANTAI TAMPORA
 BULAN AGUSTUS 2019
 PERIODE: 1-08-2019 (TGL 01/5/D-19-2019)
 BKPH TAMAN

NO	TANGGAL	PENDAPATAN							PENGELUARAN			SEKTOR PERHUTANI KPH PROB	KET	
		TIKET MASUK		PARKIR RD 2		PARKIR RD 4		JUMLAH	Pajak 15%	ASURANSI (Rp.200)	Jumlah			
		LBR	TRIP RP	LBR	RP	LBR	RP		(Rp 750)	KPH				
1	01-08-2019	27	5,000	139,000	10	20,000	2	10,000	165,000	20,250	5,400	25,650	139,350	Kamis
2	02-08-2019	24	5,000	126,000	11	22,000	1	5,000	147,000	18,000	4,600	22,600	124,200	Jumat
3	03-08-2019	63	7,000	441,000	20	40,000	5	39,000	511,000	66,150	12,600	78,750	432,250	Sabtu
4	04-08-2019	102	7,000	714,000	33	66,000	9	45,000	825,000	107,100	20,400	127,500	697,500	Minggu
5	05-08-2019	21	5,000	105,000	11	22,000	-	-	127,000	15,750	4,700	19,950	107,050	Senin
6	06-08-2019	24	5,000	120,000	13	26,000	-	-	146,000	18,000	4,600	22,600	123,200	Selasa
7	07-08-2019	19	5,000	95,000	10	20,000	-	-	115,000	14,250	3,400	18,050	96,950	Rabu
8	08-08-2019	17	5,000	85,000	9	18,000	-	-	103,000	12,750	3,400	16,150	86,850	Kamis
9	09-08-2019	23	5,000	115,000	12	24,000	-	-	139,000	17,250	4,600	21,850	117,150	Jumat
10	10-08-2019	32	7,000	224,000	12	24,000	2	10,000	258,000	33,600	6,400	40,000	218,000	Sabtu
11	11-08-2019	162	7,000	1,134,000	51	102,000	14	79,000	1,306,000	170,100	32,400	202,500	1,103,500	Minggu
12	12-08-2019	32	5,000	160,000	14	28,000	1	5,000	193,000	24,000	6,400	30,400	162,600	Senin
13	13-08-2019	26	5,000	130,000	7	14,000	3	15,000	159,000	19,500	5,700	24,700	134,200	Selasa
14	14-08-2019	18	5,000	90,000	10	20,000	-	-	110,000	13,500	3,400	17,100	92,900	Rabu
15	15-08-2019	21	5,000	105,000	11	22,000	-	-	127,000	15,750	4,700	19,950	107,050	Kamis
Jumlah		511		3,773,000	234	468,000	33	199,000	4,431,000	565,500	122,700	688,150	3,742,850	
		359	7000											
		252	5000											

Mengetahui :
 Aspek/KPH Taman
 KPH Taman barat
 Taman, 15-08-2019
 Mandor Wisata

SUHADI
 PHT196R0402199410100
 SUHARTO
 KUSNO

Lampiran 6.10 Data Kunjungan Wisata Kabupaten Situbondo Tahun 2017

**DATA KUNJUNGAN WISATA
KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2017**

NO	NAMA WISATA	ALAMAT	JANUARI		FEBRUARI		MAREK		APRIL		MAY		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTUBER		NOVEMBER		DESEMBER		TOTAL (orang)			
			Indonesi	asing	Indonesi	asing	Indonesi	asing	Indonesi	asing	Indonesi	asing	Indonesi	asing	Indonesi	asing	Indonesi	asing	Indonesi	asing	Indonesi	asing	Indonesi	asing	Indonesi	asing	Indonesi	asing	Indonesi	asing
			1	TV Sakti	Barongpala	12.540	34	4.983	58	4.820	88	5.831	14	8.102	108	874	56	18.770	218	5.402	195	5.820	174	4.811	190	5.484	28	12.128	83	84.384
2	Pantai Pahl	Bongas	240.248	82	7.428	23	7.298	14	8.880	130	18.212	28	8.420	2	14.247	8	19.848	7	8.120	4	18.182	9	8.128	7	20.124	8	378.188	284		
3	Desa Adipati Widyadipura	Klumpayan	132	15	120	8	252	4	459	3	856	2	786	5	324	3	488	1	210	1	210	1	180	2	180	2	4.120	47		
4	Badang Sate Situbondo Adhara	Karubaya	201	-	245	-	288	-	292	-	374	-	287	-	220	-	210	-	195	-	310	-	195	-	180	-	2.880	4		
5	Pantai Bangsan Agung	Sambomaling	12	5	10	3	8	2	7	4	8	2	5	1	8	2	7	2	8	1	4	-	8	1	120	5	207	28		
6	Wu Turya Takapung	Barongpala	12	-	8	-	7	-	12	-	8	-	10	-	15	-	12	-	18	-	14	-	10	-	15	5	140	5		
																									470.264	1.576				

Situbondo, 2017

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SITUBONDO**

Drs. H. SOFWAN HADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 199202 1 002